

EDISI IX Maret 2013

PEMBANGUNAN

Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

ANALITIK & VISIONER



**SINERGITAS PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH DIPERLUKAN
DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH**

OLEH MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS

**SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN
DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH**

OLEH KEPALA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

SALAM PEMBANGUNAN !

Majalah pembangunan pada edisi ini dengan tema berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Tengah. Topik Khusus mengenai arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ibu Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 dan apa saja yang perlu dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2014. Topik Utama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bapak Prof.Dr.rer.pol Patta Tope,SE menyampaikan tema RKPd Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 adalah "MEMPERKUAT EKONOMI DAERAH MELALUI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF". Di Topik Utama juga Bapak Prof.Dr.rer.pol Patta Tope,SE menyampaikan perekonomian Sulawesi Tengah yang berkualitas, yang dapat dilihat dari perkembangan indikator makro perekonomian Sulawesi Tengah ke arah yang positif. "Sungguh Menggembirakan" ungkap beliau.

Edisi kali ini juga dilengkapi dengan laporan dari pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu Kick Off Meeting Geospasial Untuk Sulawesi dengan tema " Bersama Menata Sulawesi yang Lebih Maju Melalui Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Infrastrukturnya" yang sekaligus dirangkaikan dengan "Launching Jaringan Data Spasial Daerah (JDSD) Provinsi Sulawesi Tengah"; Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional se-Sulawesi Tahun 2013 yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, pada tanggal 4-5 Maret 2013; dan Rapat Teknis Daerah Pimpinan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota 2013 Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, hadir pula artikel mengenai Trofi Anugerah Pangripta Nusantara yang merupakan sebuah bentuk apresiasi atau penghargaan atas dokumen perencanaan pembangunan terbaik.

"Kami berpikir, bagaimana kita bisa membangun suatu daerah kalau tidak ada data akurat" - Pernyataan Prof.Dr.rer.pol Patta Tope,se pada saat Rakortek Pimpinan BPS Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah serta pernyataan Bupati Polewali Mandar, Ali Baal. Pernyataan tersebut diungkapkan beliau dalam artikel yang ditulis oleh Sherly Heumasse dan Akram Zakaria dengan judul "Dimulai Dari Data Ke Tata Laksana Pemerintahan Yang Tepat Sasaran", sebuah tulisan yang mengungkapkan peranan penting "Data" dalam mendukung program pembangunan. Bapak Saliman Simanjuntak selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan kesiapannya dalam mendukung pembangunan di Sulawesi Tengah melalui pengelolaan sumber daya air yang memang benar-benar ditujukan untuk pelayanan masyarakat, sehingga tepat guna, efektif dan efisien. "Kelola air dengan benar, masyarakat kan sejahtera" ungkap beliau.

Keindahan alam di Sulawesi Tengah yaitu Pantai Siuri dan Air Terjun Saluopa Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, diceritakan dengan judul "Eksotis Nan Indah". Menggugah naluri wisata anda untuk segera berkunjung di tempat tersebut. Laporan dari sosialisasi RPJMD di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, serta Apel Siaga Sensus Pertanian 2013 juga turut dihadirkan.

Artikel lain mengenai Millenium Development Goals (MDG'S) dan Agenda Pembangunan Pasca 2015, serta Prospek Perekonomian Sulawesi Tengah Tahun 2013, turut melengkapi edisi majalah pembangunan kali ini.

Akhir kata, SELAMAT MEMBACA !!!

PEMBANGUNAN

PELINDUNG

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

PEMBINA

Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Tengah

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bappeda Prov. Sulawesi Tengah

PEMIMPIN REDAKSI

Ir. CH. Shandra Tobondo, MT

REDAKTUR PELAKSANA

Ummi Kalsum, S.Pi
 Mohammad Rusli, S.Kom., M.Si

REDAKSI

Busman, SE., M.Si; Rosdiana Hasan, B.Sc;
 Ch. Linda, SH; Rian Martin, SE;
 Muh Kurniawan, S.Sos; Farolan, S.Kom;

EDITOR

Rifain, SH
 Ainun Jariah

FOTOGRAFI

Untung Harry Wijaya, S.Kom;
 Yusran

DESIGN GRAFIS

Prima Vico Dalim, ST;
 Gustav Pator

SIRKULASI

Janty Rachmat, SE

ALAMAT REDAKSI,

BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH
 BIDANG DATA DAN STATISTIK

Jl. Prof M Yamin
 Palu

Telp : 0451 - 429021
 bappeda.sulteng.go.id

email :

m_pembangunan@bappeda.sulteng.go.id



04



10



22

- 04** SINERGITAS PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH DIPERLUKAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
Prof.Dr. Armida S Alisjahbana
- 10** KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI TENGAH
Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah
Prof.Dr.rer:pol Patta Tope, SE
- 18** PROSPEK PEREKONOMIAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013
Kabid Data dan Statistik Bappeda Prov Sulteng
Ir. Ch. Shandra T, MT
- 22** KICK OFF MEETING
GEOSPASIAL UNTUK SULAWESI
Bersama Menata Sulawesi Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- 25** RAPAT TEKNIS DAERAH
Pimpinan BPS Kabupaten/Kota 2013
Provinsi Sulawesi Tengah
- 28** MUSRENBANREG SE SULAWESI
Gorontalo 4 - 5 Maret 2013
- 32** ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2013



SINERGITAS PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH DIPERLUKAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

Menteri PPN/Kepala BAPPENAS

Prof.Dr. Armida S Alisjahbana

Pada tanggal 30 januari 2013 saat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ibu Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana dihadapan Kepala Bappeda Provinsi se-Indonesia menyampaikan tentang Rencana Kerja Pemerintah 2014 yang menjadi acuan atau pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2014.

Data Capaian Makro RPJMN

	2010		2011		2012	
	Target RPJM	Realisasi	Target RPJM	Realisasi	Target RPJM	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi	5,5 - 5,6	6,2	6,0 - 6,3	6,5	6,4 - 6,9	6,3 (tw I-III)
Inflasi	4 - 6	7	4,0 - 6,0	3,8	4,0 - 6,0	4,30
Pengangguran	7,6	7,1	7,3 - 7,4	6,6	6,7 - 7,0	6,14 (Agt)
Kemiskinan	12,0 - 13,5	13,33	11,5 - 12,5	12,49	10,5 - 11,5	11,66 (Sept)

Ibu Armida menyampaikan beberapa hal tentang Rancangan RKP 2014 yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dan pedomandalam menyusun Rancangan RKPD 2014. Beliau menyampaikan bahwa RKP tahun 2014 ini adalah merupakan RKP terakhir dalam RPJMN 2010-2014 yang temanya **memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.**

Unsur-unsur pokok tema RKP 2014 yaitu :

1. Pemantapan perekonomian nasional yaitu termasuk di dalamnya :
 - a. Peningkatan daya saing
 - b. Peningkatan ketahanan ekonomi
 - c. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif
2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

- a. Pembangunan SDM
 - b. Penurunan kemiskinan dan pengangguran
 - c. Mitigasi bencana, peningkatan kesra lainnya
3. Pemeliharaan stabilitas sosial dan politik

Dalam penjabaran tema RKP tahun 2014 tersebut maka apa saja yang perlu dipersiapkan di tahun 2014, dalam rangka pencapaian target target RPJMN 2014 yaitu: Dengan melihat pencapaian RPJMN yang berjalan hingga posisi 2012 serta memperhatikan asumsi apa saja yang bisa dicapai di tahun 2013.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana mengatakan bahwa selain dilihat pencapaian tersebut di atas maka terdapat beberapa hal yang masih memerlukan kerja keras dan juga pada tahun 2014 ini terdapat berbagai tantangan dan peluang internal dan eksternal yang berada di

USULAN TEMA RKP 2014 : KELANJUTAN DARI TEMA RKP SEBELUMNYA, SEJALAN DENGAN SASARAN DAN ISU KEKINIAN

RKP 2010	RKP 2011	RKP 2012	RKP 2013	RKP 2014
PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH	PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

TERDAPAT TANTANGAN DAN PELUANG INTERNAL DAN EKSTERNAL, NAMUN PROSPEK EKONOMI INDONESIA TETAP CERAH



depan kita, tetapi prospek ekonomi Indonesia tetap cerah.

Berdasarkan hal tersebut kata Ibu Armida maka terdapat kebijakan perkuatan ekonomi nasional yaitu : **Mendorong investasi dan ekspor, Meningkatkan efektifitas belanja Negara, Menjaga daya beli masyarakat, Menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar rupiah, Meningkatkan pembangunan infrastruktur, Menjaga stabilitas sosial dan politik.** Lebih jauh Ibu Armida mengatakan berdasarkan hasil sidang kabinet tanggal 29 Januari 2013 maka beberapa hal yang menjadi perhatian dan fokus pengalokasian belanja di tahun 2014 yaitu :

- Basic Infrastruktur dengan pemberian regulasi dan opportunity untuk pembangunan infrastruktur
- Prioritaskan untuk pengentasan kemiskinan termasuk the poorest of the poor
- Control belanja, batasi pengeluaran yang tidak perlu
- Flat belanja barang (tidak berarti kontraktif) tetap ekspansif tapi terkontrol
- Subsidi tetap harus terkontrol

- Cegah inflasi karena inflasi berbanding lurus dengan kemiskinan

Dan beberapa isu strategis berdasarkan direktif presiden yaitu :

- a. Pemantapan perekonomian nasional
 - Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
 - Surplus beras 10 juta tahun 2014
 - Konversi energy
 - Low cist emission car (green car)
 - Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
- b. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
 - Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
 - Peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih dalam rangka pencapaian MDG's
 - Pembangunan shelter bencana

Menurut Ibu Armida bahwa kegiatan-

kegiatan yang perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk mendukung RPJMN 2014 yang dibagi berdasarkan prioritas yaitu :

Prioritas Nasional 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

- Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
- Kinerja Laporan Keuangan Pemda
- Skor Integritas Pelayanan Publik (Daerah)
- Peringkat Kemudahan Berusaha
- Indeks Efektifitas Pemerintahan
- Kinerja Kab/Kota yang Akuntabel

Prioritas Nasional 2 : Pendidikan

- Persentase guru yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme
- Jumlah siswa penerima dana BOSDA
- Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan

Prioritas Nasional 3 : Kesehatan

- Angka Kematian Ibu Melahirkan
- Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cukupan persalinan oleh tenaga kesehatan)
- Angka Kematian Bayi
- Prevalensi Kekurangan Gizi
- Total Fertility Rate (TFR) : Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi)

Prioritas Nasional 4 : Penanggulangan Kemiskinan

- Jumlah Siswa Penerima Beasiswa Miskin
- Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara

Prioritas Nasional 5 : Ketahanan Pangan

- Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi
- Produksi Bahan Pangan : padi, jagung, kedelai, daging sapi, perikanan

Prioritas Nasional 6 : Infrastruktur

- Jumlah fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan (non strategis) yang ditingkatkan
- Jumlah rusunawa terbangun
- Jumlah penyelenggaraan transportasi ramah lingkungan



Kinerja pembangunan nasional merupakan agregat dari kinerja pembangunan seluruh daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan agregasi dari semua pencapaian provinsi. Dan pencapaian kinerja di provinsi merupakan agregasi pencapaian ditingkat kabupaten.



Prioritas Nasional 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha

- Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama
- Waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi

Prioritas Nasional 8 : Energi

- Produksi Minyak Bumi
- Pembangunan SPBG
- Kapasitas PLTP Terpasang

Prioritas Nasional 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

- Fasilitasi pengembangan hutan kota
- Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan di DAS Prioritas
- Jumlah luasan kawasan pesisir rusak

Prioritas Nasional 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

- Jumlah Kabupaten di daerah tertinggal
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal



tentang tema RKP 2014 dan capaian pembangunan mid term review isu-isu strategis RKP 2014 dalam rangka sinergitas prioritas pusat dan daerah maka sinergitas perencanaan pembangunan pusat dan daerah dapat diperkuat dan bersinergi dengan baik. Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikannya bahwa kinerja pembangunan nasional merupakan agregat dari kinerja pembangunan seluruh daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan agregasi dari semua pencapaian provinsi. Dan pencapaian kinerja di provinsi merupakan agregasi pencapaian ditingkat kabupaten. Dengan demikian tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan nasional menjadi kewajiban bersama antara pemerintah Pusat

dan Daerah. Diharapkan komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki tugas dan fungsi untuk menkoordinasikan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di Wilayahnya dan menjaga konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah.

Lebih lanjut Ibu Armida menyampaikan di tengah kondisi persaingan ekonomi global yang

Prioritas Nasional 11 : Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi

- Jumlah paket difusi dan pemanfaatan iptek

Prioritas Nasional 12 : Perekonomian

- Pertumbuhan industry
- Pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita

Prioritas Nasional 13 : Kesejahteraan Rakyat

- Jumlah Kabupaten di daerah tertinggal
- Berdasarkan penyampaian kepala Bappenas

masih tidak menentu, penguatan ekonomi domestic menjadi syarat mutlak agar Indonesia dapat tetap menjaga pertumbuhan yang berkualitas. Sinergi pusat dan daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan

ekonomi dan meningkatkan kualitas pertumbuhan merupakan aspek prioritas yang perlu kita lakukan bersama-sama .

TEMA RKPd PROV. SULTENG TAHUN 2014: ” MEMPERKUAT EKONOMI DAERAH MELALUI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF ”

Prof.Dr.rer.pol PATTA TOPE



Berdasarkan penyampaian oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas tentang sinkronisasi Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan, maka berdasarkan capaian pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan isu-isu strategis yang ada, maka Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPd) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 yaitu: ” **Memperkuat Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif** ”.

RKPd Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 merupakan RPKD tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 yang mempunyai visi yaitu: ”**Sulawesi Tengah Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia Dalam Pengembangan Agribisnis Dan Kelautan Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Pada Tahun 2020**”. Dan visi tersebut dapat dicapai melalui rangkaian misi:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur;
4. Reformasi birokrasi dan penegakkan supremasi hukum dan HAM;

5. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan capaian pembangunan tahun sebelumnya, maka permasalahan pembangunan tahun 2014 yang tertuang di dalam rancangan RKPd Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 yaitu:

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia belum memadai;
2. Pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan belum optimal;
3. Pembangunan infrastruktur belum memadai;
4. Reformasi birokrasi, penegakkan supremasi hukum dan HAM belum optimal;
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan Dan Berkelanjutan Belum Optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam Rancangan RKPd Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 yaitu:

1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Revitalisasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan;
4. Iklim investasi dan iklim usaha;
5. Peningkatan infrastruktur dan Energi;
6. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
7. Pembangunan hukum dan ketertiban;
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.



KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI TENGAH

Prof. Dr. rer. pol. PATT A TOPE, SE

Capaian Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2012 sungguh menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari indikator makro ekonomi antara lain :

a. Perkembangan PDRB Sulawesi Tengah

Sepanjang tahun 2012 perekonomian di Sulawesi Tengah menunjukkan kinerja yang sangat positif dan perekonomian yang berkualitas. Hal ini dilihat dari persentase kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan meningkat sebesar 9,27%, dan tahun 2011 mencapai 9,16%. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 sepanjang tahun 2012 mengalami kenaikan dari Rp 19.237 miliar menjadi Rp. 21.019 miliar dan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2012 mengalami kenaikan Rp. 51.062 miliar dan tahun 2011 mencapai Rp 44.312 miliar. Semua sektor tumbuh positif di tahun 2012 dan yang tertinggi adalah sektor pertambangan

dan penggalian yang mencapai 26,99 persen.

Bila dilihat dari struktur ekonomi sektoral pertumbuhan tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 26,99%, sektor konstruksi sebesar 18,20% dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 9,58%.

Sektor pertambangan bukan migas mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 26,99% dan pada tw IV 2012 mengalami peningkatan yang drastis. Hal ini berdasarkan adanya konsolidasi perizinan dan pemenuhan persyaratan yang telah dilakukan perusahaan tambang Kabupaten Morowali, Tojo Una-una dan Kabupaten Banggai pasca terbitnya peraturan menteri ESDM Nomor 11 tahun 2012 tentang nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Salah satu inti peraturan tersebut bahwa perusahaan tambang dapat melakukan ekspor biji atau ore mineral yaitu nikel ke luar negeri sebelum tahun 2014 apabila telah mendapatkan rekomendasi

menteri ESDM.

Disisi permintaan, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh kelompok konsumsi rumah tangga, kelompok ekspor, dan kelompok investasi masing-masing sebesar 3,92%, 2,19% dan 3,28%. Berdasarkan strukturnya PDRB Sulawesi Tengah masih ditopang oleh sektor primer dengan pangsa sebesar 46,15% diikuti sektor tersier dan sekunder dengan pangsa masing-masing 39,84% dan 14,01%.

b. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah bruto yang dihasilkan masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas ekonomi.

Angka PDRB perkapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah yang terus meningkat setiap tahun ikut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 yaitu sebesar 18,50 juta rupiah, mengalami

peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar 16,51 juta rupiah. Angka ini melebihi target yang diamanatkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016.

Selanjutnya dilihat dari capaian PDRB Per kapita kabupaten/kota se Sulawesi Tengah tahun 2011, maka capaian tertinggi berada di Kabupaten Morowali dengan PDRB perkapita sebesar 21,85 juta rupiah, sedangkan terendah berada di Kabupaten Tojo Una-Una dengan PDRB Perkapita sebesar 9,8 juta rupiah.

Secara regional KTI, posisi PDRB Perkapita Sulteng pada Tahun 2011 sebesar 16,51 Juta Rupiah menempati posisi ke-8, setelah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat & Kalimantan Timur.

c. Perkembangan inflasi

Perekonomian suatu daerah yang sedang membangun, rentan terhadap inflasi. Inflasi

Nilai dan Pertumbuhan PDRB serta Sumbangannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 dan 2012

No.	Sektor Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Milliar Rupiah) Tahun 2011		Tahun 2011		Nilai PDRB (Milliar Rupiah) Tahun 2012		Tahun 2012	
		ADHB	ADHK 2000	Pertumbuhan (%)	Sumber Pertumbuhan (%)	ADHB	ADHK 2000	Pertumbuhan (%)	Sumber Pertumbuhan (%)
1.	Pertanian	16.494	7.529	6,77	2,71	18.276	7.994	6,19	2,42
2.	Pertambangan & Pengalihan	2.768	1.099	35,16	1,71	3.652	1.392	26,99	1,54
3.	Industri Pengolahan	3.084	1.161	4,73	0,30	3.364	1.222	5,29	0,32
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	286	133	7,35	0,05	333	146	8,32	0,06
5.	Konstruksi	3.206	1.373	15,47	1,04	4.052	1.623	18,20	1,20
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	5.301	2.465	7,80	1,01	6.194	2.701	9,38	1,23
7.	Pengangkutan & Komunikasi	3.147	1.440	8,06	0,61	3.606	1.564	8,57	0,64
8.	Keuangan, Sewa & Jn. Perusahaan	2.144	927	9,30	0,45	2.419	997	7,54	0,36
9.	Jasa-Jasa	7.883	3.112	7,81	1,28	9.063	3.380	8,64	1,40
PDRB		44.312	19.239.945	9,16	9,16	51.062	21.019	9,27	9,27

Sumber: BPS, Pertumbuhan Ekonomi Sulteng 2012, BRS 2013.

**Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV/2012**

No.	Sektor Lapangan Usaha	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Tw. IV/2012 (q to q)	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Tw. IV/2012 (y on y)
1.	Pertanian	0,80	2,21
2.	Pertambangan & Penggalian	5,39	4,71
3.	Industri Pengolahan	0,05	0,26
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,01	0,05
5.	Konstruksi	0,61	1,07
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	0,12	0,45
7.	Pengangkutan & Komunikasi	0,43	0,63
8.	Keuangan, Sewa & Js. Perusahaan	0,12	0,38
9.	Jasa-Jasa	0,31	1,21
PDRB		7,83	10,97

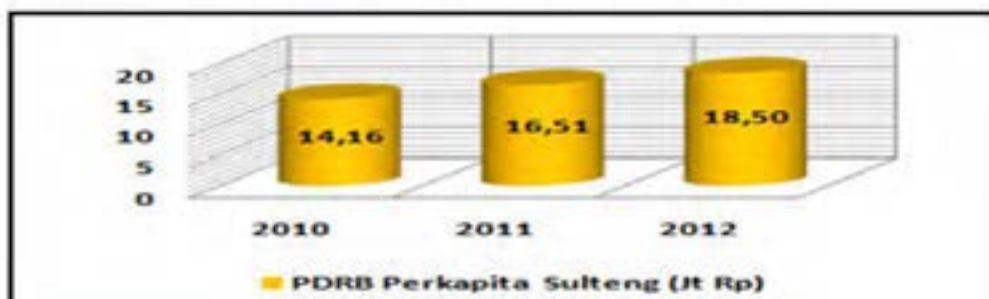
Sumber: BPS, Pertumbuhan Ekonomi Sulteng 2012, BRS 2013.

**Nilai, Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pengguna
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2012**

No.	PDRB Komponen Penggunaan	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)		Distribusi (%)		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah)		Pertumbuhan (%)	Sumber Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2012	2012
1.	Konsumsi Rumah Tangga	26.549	29.254	59,91	57,29	10.712	11.467	7,048	3,925
2.	Lembaga Non-Profit	720	794	1,62	1,55	268	267	0,277	0,004
3.	Konsumsi Pemerintah	7.409	8.991	16,72	17,61	3.443	3.661	6,331	1,333
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.541	9.982	17,02	19,55	3.787	4.418	16,663	3,281
5.	Perubahan Inventori	591	732	1,34	1,43	242	267	10,328	0,130
6.	Ekspor	7.733	9.307	17,45	18,23	3.108	3.530	13,549	2,192
7.	Impor	6.231	7.998	14,06	15,66	2.323	2.591	11,514	1,791
PDRB		44.312	51.062	100,00	100,00	19.237	21.019	9,266	9,266

Sumber: BPS, Pertumbuhan Ekonomi Sulteng 2012, BRS 2013.

Perkembangan PDRB Perkapita Sulteng 2010-2013



Sumber: BPS, Pertumbuhan Ekonomi Sulteng 2012, BRS 2013.

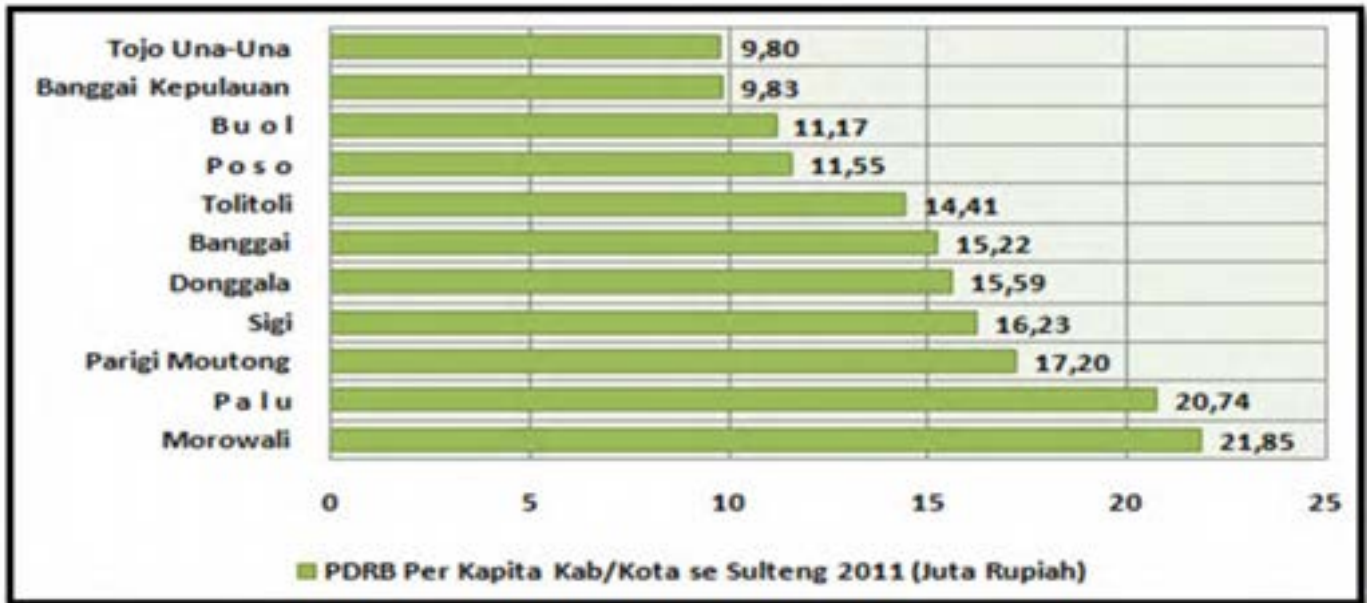
menggambarkan naiknya harga-harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara umum atau turunnya harga beli mata uang tertentu (rupiah).

Inflasi diukur dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga. Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah yang dihitung dari besarnya inflasi Kota Palu sebesar 4,69% pada tahun 2011 naik menjadi 5,87% di tahun 2012. Kenaikan inflasi tersebut diakibatkan oleh adanya bencana alam di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, sehingga mengganggu alur distribusi barang dan jasa.

d. Kesenjangan Distribusi Pendapatan

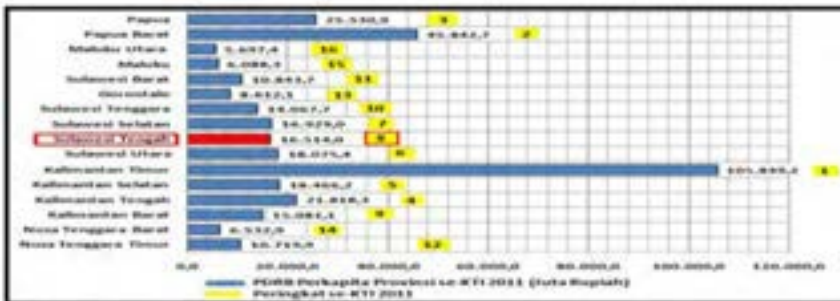
Salah satu aspek kesejahteraan dapat ditinjau dari distribusi pendapatan masyarakat Sulawesi Tengah, hal ini dapat digambarkan dengan indikator indeks gini atau koefisien gini. Nilai indeks gini berada diantara 0 sampai dengan 1, bila nilai indeks gini bernilai 0 maka pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna dan indeks gini bernilai 1 maka terjadi

Capaian PDRB Per kapita Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2011



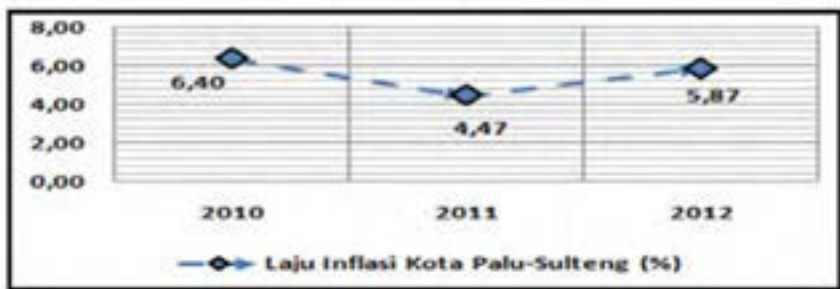
Sumber: BPS, PDRB Sulteng Tahun 2012

Posisi dan Perbandingan PDRB Per Kapita Provinsi Di Wilayah Kawasan Timur Indonesia Tahun 2011



Sumber: BPS, Indikator Sosial Ekonomi Indonesia, Tahun 2012

Perkembangan Laju Inflasi Kota Palu-Sulawesi Tengah Tahun 2010 - 2012



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2012, BPS 2013.

ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna.

Pada tahun 2011 indeks gini mencapai 0,34, bila dibandingkan tahun 2010 (0,32) atau naik sebesar 0,02 point. Sementara tiga tahun terakhir (2009-2011) indeks gini Sulawesi Tengah terjadi fluktuasi namun besarnya cukup kecil atau dapat dikatakan cenderung konstan dengan kisaran 0,29-0,34. Sedangkan indeks gini tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,34 sementara terendah pada tahun 2009 sebesar 0,29.

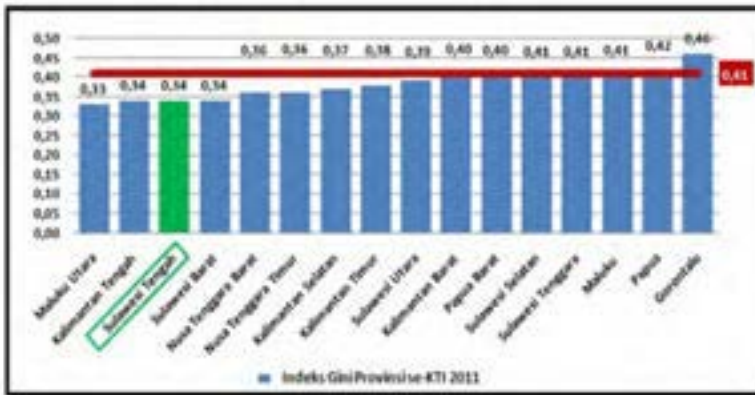
Terlihat bahwa perkembangan indeks gini Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2009-2011 cenderung bergerak semakin meningkat, dimana pada Tahun 2009 sebesar 0,29 poin menjadi 0,32 poin pada Tahun 2010, selanjutnya pada Tahun 2011 meningkat menjadi 0,34 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kue ekonomi

Trend Indeks Gini Rasio Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 – 2011



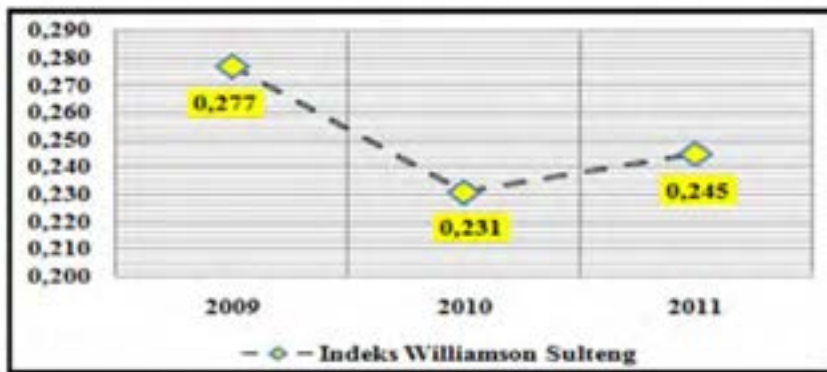
Sumber: BPS RI, Indikator Sosial Ekonomi Indonesia 2012.

Posisi & Perbandingan Indeks Gini Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2011



Sumber: BPS, Indikator Sosial Ekonomi Indonesia 2012, & BPS Prov. Sulteng 2012

Trend Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 – 2011



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2012, [Data Diolah Kerbali].

Sulawesi Tengah yang terbagi selama ini belum terlalu adil.

Indeks Gini Sulawesi Tengah Tahun 2011 sebesar 0,34 poin lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional yang nilainya sebesar 0,41 poin. Secara regional Kawasan Timur Indonesia, Sulawesi Tengah menempati urutan ke-3 Indeks Gini terendah, setelah Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar individu di Sulawesi Tengah berada pada posisi terbaik ketiga di Kawasan Timur Indonesia

e. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi dimasing-masing wilayah/daerah merupakan salah satu pemicu terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun demikian, adanya perbaikan perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan strategi kebijakan pembangunan daerah yang dijawantahkan melalui program/kegiatan di masing-masing pemerintah daerah diharapkan mampu dan dapat meminimalisir adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut. Salah satu indikator makro yang lazim digunakan untuk melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu kawasan adalah analisis Indeks Williamson (IW).

Gambaran disparitas pembangunan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, melalui pendekatan Indeks Williamson pada tahun 2011 mencapai 0,24, naik sedikit dibanding tahun 2010 sebesar 0,23.

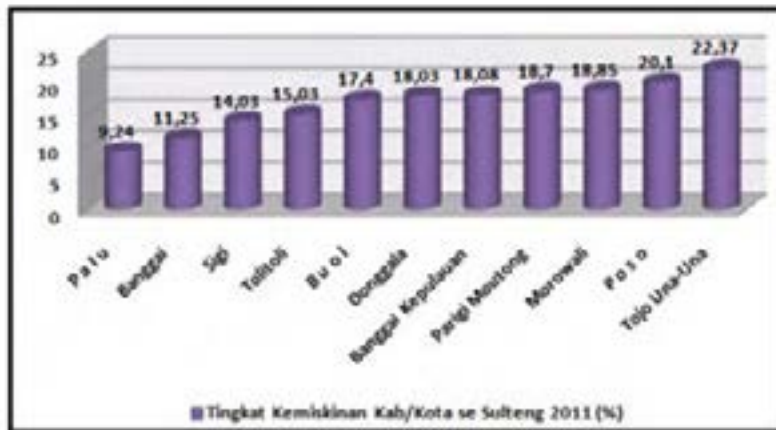
Perkembangan Indeks Williamson

Perkembangan Penduduk Miskin Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 – 2012



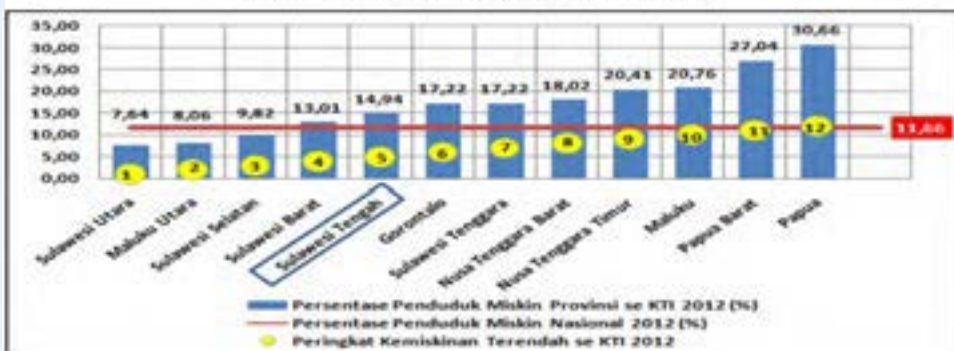
Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2012, BPS Tahun 2013.

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011



Sumber: BPS, Indikator Sosial Budaya Prov. Sulteng 2012

Posisi dan Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2012



Sumber: BPS, Statistik Indonesia Tahun 2012.

periode 2007-2011 cenderung konstan, dengan intervalnya berada di antara 0,23-0,28. Disparitas pembangunan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 0,28 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 0,23.

f. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2012 tercatat sebanyak 409.600 jiwa atau 14,94% dari jumlah seluruh penduduk Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah penduduk miskin tersebut lebih kecil dari periode sebelumnya (2011) yaitu sebanyak 432.070 jiwa (16,04%). Angka kemiskinan tersebut walaupun mengalami penurunan tetapi persentase masyarakat miskin tersebut masih diatas persentase nasional.

Selanjutnya dilihat dari sebaran kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah Tahun 2011, tingkat kemiskinan terendah berada di Kota Palu (9,24%), menyusul Kabupaten Banggai (11,25%), Sigi (14,03%), dan Tolitoli (15,03%). Sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Tojo Una-Una (22,37%).

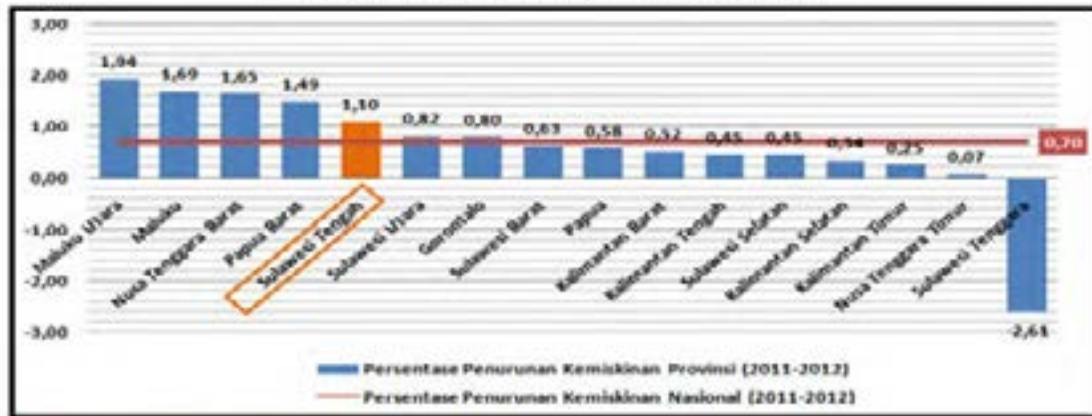
Dalam tataran regional KTI Tahun 2012, Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 sebesar 14,94 % masih diatas kemiskinan nasional sebesar 11,66% dan Sulteng menempati

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 – 2012



Sumber: BPS, Indikator Sosial Ekonomi Indonesia 2012.

Posisi dan Perbandingan Persentase Penurunan Kemiskinan Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2011-2012



Sumber: BPS, BRS Ketenagakerjaan Nasional Tahun 2013.

urutan ke-5 tingkat kemiskinan terendah se KTI.

Sementara dilihat dari persentase penurunan kemiskinan provinsi di KTI tahun 2011-2012, maka persentase penurunan kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,10 % poin diatas persentase penurunan kemiskinan nasional yang hanya sebesar 0,70% poin.

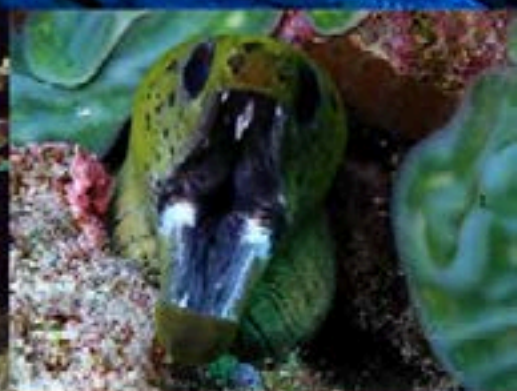
e. Pengangguran

Dari sisi pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah jauh dibawah TPT Nasional, dan Capaian TPT Sulteng Tahun 2011-2012 melampaui Target RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016. TPT Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2010 sebesar 4,61% menurun menjadi 3,93% pada tahun 2012, atau selama tahun 2010 - 2012 mengalami penurunan sebesar 0,68 persen.

Selanjutnya dilihat dari angka pengangguran di kabupaten/kota se Sulawesi Tengah tahun 2012, maka TPT tertinggi berada di Kabupaten Banggai yaitu sebesar 7,53%, menyusul Kota Palu dengan TPT sebesar 7,03%, dan Kabupaten Morowali dengan TPT sebesar 4,63%. Sedangkan TPT terendah berada di Kabupaten Tolitoli yaitu sebesar 1,15%.

Let's Visit Central Sulawesi

*The land of culture and history
The land of the future*



Road to
Sail Tomini 2014
From Ridge to Reef



Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, MSI
Governor



H. SUDARTO, SH, M. Hum
Vice Governor



Government of Central Sulawesi Province
Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Central Sulawesi - Indonesia
Phone : +62 451 421411 - 421412 - 421812
Fax : +62 451 421412
E-mail : admin@sulteng.go.id
Website : www.sulteng.go.id

Supported by Marine Affairs and Fisheries Service (MARS) Central Sulawesi Province
Mandor, Prince John Dive Resort & Black Marine Diving Resort



PROSPEK PEREKONOMIAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013

Ir. Ch. Shandra T, MT

Kabid Data dan Statistik Bappeda Prov Sulteng



Kinerja makro ekonomi dapat menjadi barometer seberapa besar pencapaian stabilitas makro ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mantap, investasi meningkat, inflasi rendah, pengangguran dan kemiskinan semakin menurun. Kinerja makro ekonomi sebuah daerah tidak lepas dari faktor internal dan factor eksternal yang mempengaruhi perkembangan perekonomian disuatu daerah..

Prospek perekonomian Sulawesi Tengah pada tahun 2013 diproyeksikan akan semakin membaik dibandingkan pada tahun 2012. Prospek perekonomian yang meningkat pada tahun 2013 disebabkan karena :

Adanya nilai tambah sektor bangunan yang melonjak tajam : diakibatkan oleh kinerja sektor

bangunan akan tumbuh dikarenakan penyelesaian tahun terakhir proyek konstruksi konstruksi pembangunan PT Donggi- Sinoro LNG pada tahun 2013. Rencana pembangunan berbagai hotel berbintang, serta pembangunan real estate misalnya Citra Land, penyelesaian pembangunan Grand Mall Palu (Taman Ria) penyelesaian pembangunan ruko

dan ruko baru serta pembangunan perluasan landasan Mutiara, pembangunan Bandara Tojo Una-Una, perluasan Bandara Kasiguncu Poso dan Syukuran Aminudin Amir di Luwuk, penyelesaian konstruksi PLTA Sulewana, kelanjutan pembangunan Hotel Mercure, Hotel Coco, Hotel Roa-Roa, Hotel Sultan Raja dan rencana investasi dari Lippo group yaitu pembangunan Rumah Sakit Internasional Siloam.

Kinerja sektor pertambangan di tahun 2013 diproyeksi akan meningkat tajam disebabkan pulihnya kinerja sector pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah pasca terbitnya Peraturan Menteri ESDM no 11 tahun 2012 tentang Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan penolahan dan pemurnian mineral. Dan beberapa perusahaan tambang yang tersebar di Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-una dan Banggai telah melakukan konsolidasi perizinan dan pemenuhan persyaratan seperti 1.Status IUP operasi produksi dan IPR Clear dan Clean dalam arti bahwa setiap perusahaan tambang wajib memiliki IUP operasi produksi yang telah disetujui 2.Perusahaan pertambangan harus melunasi kewajiban pembayaran keuangan pada Negara 3.Perusahaan tambang harus menyampaikan rencana kerja atau kerjasama dalam pengelolaan dan atau pemurnian mineral di dalam negeri 4.Perusahaan pertambangan wajib menandatangani pakta integritas.

Kinerja sektor listrik, gas dan air bersih pada Tahun 2013 akan tumbuh positif disebabkan akan tumbuhnya investasi yang merupakan faktor tumbuhnya sector listrik, gas dan air bersih.

Salah satu indikator yang mendukung tersebut adalah konsumsi listrik kota palu akan meningkat karena dimafratkannya output listrik dari PLTA Sulewana II yang berdaya 65 MW pada pertengahan tahun 2013 sudah dapat dinikmati oleh masyarakat kota palu

Selanjutnya sektor angkutan dan komunikasi di tahun 2013 diprediksi akan tumbuh positif. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti dengan daya beli masyarakat akan mempengaruhi penambahan frekuensi penerbangan dan masuknya investasi diberbagai sector disebabkan telah berfungsinya jaringan listrik PLTA Sulewana yang juga berdampak positif dan tumbuhnya terhadap sektor angkutan dan komunikasi tersebut.

Selanjutnya nilai tambah sekor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan akan tumbuh disebabkan karena pemenuhan listrik dari PLTA Sulewana sehingga dapat mengakselerasi kinerja investasi kedepan. Dan pada tahun 2013 ini terdapat beberapa kegiatan besar seperti pertemuan Kick Off meeting Geospasial se Regional, Sulteng Expo, dan terdapat kegiatan seminar, pelatihan dan kegiatan lainnya yang bersifat regional, nasional di provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2013. Selain hal tersebut maka semakin meningkatnya restoran yang bertaraf lokal, regional dan internasional di kota palu dengan berkembangnya restoran frenchise sehingga akan berdampak pada tumbuhnya sektor ini.

Sektor pertanian juga diproyeksi akan tumbuh signifikan, hal ini khususnya dari sektor perkebunan misalnya investor yang berinvestasi di bidang kelapa sawit sudah mulai berproduksi di tahun 2013, terutama sentra kelapa sawit Morowali, Buol dan Luwuk. Hasil rumput laut juga akan melonjak tajam pada tahun 2013 disebabkan karena pengalokasian anggaran baik APBN dan APBD untuk sektor kelautan dan perikanan di alokasikan sebagian besar untuk pengembangan rumput laut baik dikawasan mina politan Morowali dan kluster rumput laut berpusat di Kabupaten Parigi Moutong.

Nilai tambah sektor industri juga akan mengalami kenaikan dengan masuknya berbagai investasi baik investasi dibidang pertanian dan sebagainya, masuknya investasi diberbagai sector disebabkan telah berfungsinya jaringan listrik PLTA Sulewana yang juga berdampak positif dan tumbuhnya terhadap sektor industri dan sekor lainnya. Industri manufaktur besar dan sedang, mikro dan kecil juga akan meningkat tajam. Industri pengolahan meningkat tajam demikian juga subsektor makanan, minuman. Sektor industri ini juga akan meningkat tajam apabila pada tahun 2013 Kawasan Industri Palu telah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus oleh pemerintah pusat yang telah disediakan lahannya oleh Pemerintah Kota Palu seluas 1500 ha.

Prospek inflasi di tahun 2013 diproyeksikan tetap terjaga dengan kisaran 4 - 5%. Faktor inflasi perlu juga diwaspadai khususnya inflasi pada kelompok administered price. Karena kelompok ini nantinya akan mengalami kenaikan karena pada kelompok

administered price yang mana pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tarif dasar listrik sebesar 15% dan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 3 Tahun 2012 tentang Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. PLN yang terbit pada tanggal 21 Desember 2012 menyebutkan bahwa tarif tenaga listrik untuk pemakaian di atas 900 VA akan mengalami kenaikan. Kebijakan ini akan berdampak pada kenaikan beberapa komoditas lainnya yang disebabkan pada konsekuensi misalnya naiknya biaya tempat tinggal, biaya pergudangan dan sebagainya sehingga pengusaha akan memasukan dalam ongkos produksinya.

Kebijakan untuk menekan inflasi pada

pemerintah daerah untuk mendorong petani dalam meningkatkan produksi buah buahan dan sayur-sayuran khususnya yang terkena larangan impor dan juga termasuk dalam komoditas yang dihitung inflasinya seperti melon, papaya, nanas, pisang, kentang, kubis, wortel dan cabai. Komoditas tersebut akan menjadi peluang usaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petaninya. Dari sisi eksternal tekanan inflasi diperkirakan cenderung berkurang seiring dengan penurunan harga komoditas global, selain hal tersebut akan mengakibatkan turunnya biaya pengiriman sejalan dengan harga minyak yang cenderung turun. Berdasarkan proyeksi dari financial forecast center harga minyak dunia cenderung turun



kelompok *valatite foods* yang dalam rangka menjaga kestabilan stok makanan dapat dilakukan dengan diversifikasi tanaman pekarangan rumah dengan berbagai tanaman yang tumbuh dilahan pekarangan seperti cabe rawit, tomat dan sayur. Terkait dengan kebijakan pemerintah pusat tentang pembatasan impor hortikultura walaupun daerah Sulawesi Tengah merupakan salah satu sentra produksi buah-buahan dan sayur-sayuran tetapi pemerintah daerah harus mengantisipasinya apabila terdapat transaksi dagang yang berlebihan sehingga mengakibatkan berkurangnya pasokan buah-buahan dan sayur-sayuran didaerah ini yang mengakibatkan inflasi. Berkaitan dengan regulasi tersebut maka tantangan

pada tw-1 2013.

Dalam rangka pengendalian inflasi telah terdapat kelembagaan yang dibentuk oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu Tim Pengendali Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari berbagai stakeholder baik Pemerintah Daerah, Akademisi dan Perbankan. Dan tim tersebut setiap triwulan melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan inflasi kota palu dan TIPD tersebut pada tahun 2013 ini mempunyai program penelitian berkaitan dengan pengembangan Sistem Informasi harga terpadu dengan menggunakan alternatif berbagai media seperti website dan sms.



Sulteng expo 2013

*Pameran Nasional Produk Unggulan Daerah
dan Jasa Layanan Publik*

13 - 17 April 2013

**Arena Vatulemo, Kota Palu
Sulawesi Tengah**

Menampilkan :



PENYELENGGARA



PEMROV
SULAWESI TENGAH

PELAKSANA



TIGAWARNA
PROMO EXHIS



Drs. H. Longki Djanggola, M.Si
Gubernur Sulawesi Tengah

H. Sudarto, SH, M.Hum
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Didukung Oleh



Pemerintah Kabupaten Palu



Pemerintah Kabupaten Donggala



Pemerintah Kabupaten Parigi



Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong



Pemerintah Kabupaten Toli Toli



Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong



Pemerintah Kabupaten Morowali



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja



Pemerintah Kabupaten Buana



Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Official Hotel :





KICK OFF MEETING GEOSPASIAL UNTUK SULAWESI

**Bersama Menata Sulawesi Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan
Informasi Geospasial**



Kegiatan Kick Off Meeting Geospasial untuk Sulawesi dengan mengusung tema “Bersama Menata Sulawesi yang Lebih Maju Melalui Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Infrastrukturnya” sekaligus dirangkaikan dengan “Launching Jaringan Data Spasial Daerah (JDSD) Provinsi Sulawesi Tengah” dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2013 bertempat di Hotel Santika Palu.



Tujuan dilaksanakannya “Kick Off Meeting Geospasial Untuk Sulawesi” adalah 1) sosialisasi rencana kegiatan geospasial untuk Sulawesi 2) penguatan kerjasama BIG dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi dan 3) peningkatan pemanfaatan informasi geospasial dalam proses pembangunan di Sulawesi.

Acara diawali dengan Sambutan dari Gubernur Sulawesi Tengah, Sambutan dari Kepala BIG dan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang kemudian dilaksanakan peluncuran Geospasial untuk Sulawesi. Selanjutnya dilaksanakan pula penandatanganan Nota Kesepahaman antara BIG dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan dilanjutkan dengan presentasi tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam arahannya mengatakan bahwa, data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan hal mendasar yang diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa seluruh kegiatan pembangunan (nasional, provinsi, kabupaten/kota) haruslah direncanakan berdasarkan data statistik dan informasi geospasial yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial atau dikenal dengan UU IG merupakan peluang dan tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan secara lebih terarah dan tepat sasaran. UU IG merupakan undang-undang yang pertama menjadi payung hukum dan mengatur dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial di Indonesia.

Untuk tahun 2013 ini pihak BIG di wilayah Sulawesi Tengah akan melakukan pemetaan rupa bumi Indonesia skala 1 : 25.000 dan 1 : 10.000



RAPAT TEKNIS DAERAH Pimpinan BPS Kabupaten/Kota 2013 Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tanggal 26 Februari - 1 Maret 2013 pihak BPS melakukan rapat Teknis Daerah dengan peserta seluruh pimpinan BPS Kab/Kota se Sulawesi Tengah, dengan narasumber Kepala Bappeda Prof.Dr.rer.pol Patta Tope,SE. Lebih lanjut Bapak Kepala Bappeda menyampaikan bahwa pentingnya data bagi perencanaan dan tanpa data perencanaan menjadi mahal dan juga tidak tepat sasaran, sehingga Kepala Bappeda mengajak semua peserta untuk bersama sama mensukseskan Sensus

Pertanian 2013 sehingga diperoleh data yang benar dan akurat yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di dalam mengambil keputusan.

Pada Ratekda tersebut Kepala BPS juga dalam sambutannya mengharapkan acara ini tidak kehilangan esensi dan melenceng dari tujuan awal pelaksanaannya apalagi sekedar menjadi ajang reuni atau silaturahmi saja. Ratekda ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis untuk mempertajam dan mengimplementasikan hasil-hasil Rateknas sesuai

dengan situasi dan kondisi daerah Saudara masing-masing. Hal ini terutama terkait dengan menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, menyatukan menyatukan sinergi dan menemukan solusi bagi permasalahan yang bisa menjadi krikil yang menghambat pelaksanaan tugas-tugas BPS terutama Sensus Pertanian (ST2013) mendatang.

Oleh karena itu saya meningkatkan saudara untuk segera mengambil langkah-langkah *konkret* yang di perlukan dalam perbaikan dan pembangunan BPS sesuai keputusan yang akan di rumuskan selama Ratekda ini. Jangan biarkan keputusan Ratekda hanya menjadi dokumen mati yang memiliki manfaat dan fungsi apapun bagi BPS.

Lebih lanjut Kepala BPS Pusat menekankan bahwa Ratekda akan membahas dua pokok bahasan utama, yaitu tentang permasalahan ST2013 dan implementasi program kerja tahun anggaran 2013. Dan hal-hal pokok yang telah disepakati dalam Rateknas sebelumnya:

1. Reuni telah kita terima dan nikmati bersama dan akan rutin kita terima meskipun tidak setiap bulan karena dibawah kendali Bagian Anggaran 99, Kementerian Keuangan. Berbagai prestasi dalam kaitan dengan dukungan penyelenggara

raan administrasi perkantoran telah berhasil kita raih. Oleh karena itu, saya mengingatkan kembali untuk bersama-sama kita lakukan upaya terbaik dalam rangka mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang.

2. Akuntabilitas dan transparansi sudah menjadi harga mati untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja administrasi BPS, pelaporan barang Milik Negara (BMN) sehingga dapat selalu kita laporkan secara tertib dan tepat waktu. Selain itu, audit kinerja yang akan dilakukan BPK di tahun ini menuntut kita untuk semakin efisien, efektif dan ekonomis dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS sebagai penyedia data. Setiap satker tak-terkecuali BPS Kabupaten/Kota harus selalu siap untuk audit itu.
3. Terkait pengelolaan anggaran tahun 2013, perencanaan yang matang adalah kunci suksesnya suatu kegiatan. Pantau awasi secara berkala realisasi dan daya serapnya. Tidak perlu menunggu sampai akhir tahun. Adanya alokasi anggaran ST2013 tentu akan menambah tanggung jawab saudara.
4. Semangat reformasi birokrasi yang kita laksanakan bermuara pada kualitas pelayanan. Pelayanan tidak lagi terbatas kepada menghasilkan data





berkualitas, tetapi harus mampu memasyarakatkan interpretasi dan pemanfaatan data BPS. Hal ini menuntut kita untuk memiliki kompetensi lebih dalam menyampaikan kepada *Stake Holder*, terutama Saudara-saudara sebagai ujung tombak di daerah.

5. Tingkatkan terus kinerja dan produktivitas kita mengingat Kementerian PAN&RB akan terus melakukan *evaluasi* dan *assessment* terhadap pemberian tunjangan kinerja (TK) yang didasarkan pada capaian RB di masing-masing K/L dan tentunya kinerja setiap individu. Ini artinya, besarnya TK yang kita terima akan sangat ditentukan oleh bobot peran yang kita sandang.
6. Terkait dengan anggaran besar ST2013, berbagai tahapan persiapan ST2013, seperti kegiatan Gladi bersih, Up-dating Direktori perusahaan, pilot monitoring Kualitas, Pilot survei paska sensus, dan persiapan publisitas ST2013 telah kita laksanakan pada tahun lalu. Tahun ini adalah puncak kegiatan ST2013. Mari memfokuskan perhatian kita pada pelatihan petugas lapangan dan sosialisasi yang puncaknya Insya Allah akan kita lakukan mulai 15 April 2013. Manfaatkanlah berbagai kearifan lokal di masing-masing daerah saudara. Upayakan untuk meminta surat edaran berupa dukungan atas pelaksanaan ST2013 dari Gubernur, Bupati/Walikota, galang dukungan dan kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten/Kota. Upayakan terobosan-terobosan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam turut menyukseskan ST2013 dengan memberikan jawaban yang benar.
7. Perhatikan pula pelaksanaan pencacahan, pengolahan, dan diseminasikan agar dapat berjalan secara tepat waktu dan mampu menghasilkan data yang berkualitas. Saya mengingatkan saudara, bahwa kita sudah terikat kontrak dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4) untuk menjamin setiap Tahapannya.
8. Data hasil sementara pelaksanaan ST2013 akan menjadi dari bagian pidato Presiden tanggal 16 Agustus 2013. Untuk itu, setiap tahapan ST2013 harus terlaksana tepat waktu, dan data yang dihasilkan harus akurat. Patuhi rumusan Rateknas Solo, pengolahan ST2013-P harus selesai akhir Juni 2013.
9. Untuk memperoleh data yang akurat menunjang swasembada daging tahun 2014, bersamaan dengan pelaksanaan pemutahiran data ST2013-P, dilaksanakan pula percepatan pengumpulan data populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau. Akurasi dan kecermatan data ini harus kita garansi untuk meningkatkan akuntabilitas atas data populasi sapi dan kerbau hasil ST2013.
10. Di tengah hiruk pikuknya ST2013, kita tidak boleh melupakan tugas-tugas kita seperti Susesnas yang hasilnya sangat di tunggu untuk menghitung indikator kemiskinan, sakernas untuk mengukur pengangguran, survei harga untuk menghitung inflasi, Suurvei industri dan survei-survei rutin lainnya. Kita juga perlu mengantisipasi tugas-tugas *ad hoc* baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang tidak dapat kita tolak. Yang ada agar semuanya dapat berjalan sinergis output yang benar-benar berkualitas.



MUSRENBANREG SE SULAWESI Gorontalo 4 - 5 Maret 2013



Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional se-Sulawesi Tahun 2013 dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, dengan tempat di Hotel Maqna, Jalan Sultan Botutihe No. 88, Gorontalo 90114, tanggal 4-5 Maret 2013. Acara Musrenbangreg se Sulawesi Tahun 2013 tersebut dibuka dan sekaligus ditandai dengan pemukulan gong oleh Deputi Pengembangan Regional

dan Otonomi Daerah Bappenas Dr. Ir. Max H. Pohan, CES, MA, didampingi Gubernur Gorontalo Drs. H Rusli Habibie MAP dan Wakil Gubernur Dr. Drs Idris Rahim MM.

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional se-Sulawesi Tahun 2013 ini adalah: (1) Dalam rangka membahas dan menetapkan kegiatan prioritas, yang



melibatkan daerah-daerah atau provinsi se-Sulawesi, (2) Merupakan ajang menyatukan gagasan/ide agar pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan supaya lebih terarah dan sinkron dengan berbagai daerah yang terdapat di wilayah Sulawesi.

Pelaksanaan Musrenbang Regional se-Sulawesi Tahun 2013 mengusung tema: **SULAWESI CONNECTIVITY “PENGUATAN IMPLEMENTASI DAN INTEGRASI MP3EI UNTUK MENDORONG SINERGI PEMBANGUNAN REGIONAL SULAWESI”**.

Hadir pada pertemuan Musrenbang Regional se-Sulawesi Tahun 2013 ini yaitu Gubernur Sulawesi Tengah,

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, termasuk Bupati dan Walikota se Sulawesi, selain itu juga hadir dan sekaligus menjadi narasumber pada sesi pertama yaitu Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Dr. Ir. Max H. Pohan, CES, MA, Staf Ahli Menteri PU Ir. Taufik Wijayanto, M,Sc., staf ahli Menteri Perhubungan Dr. Budi Muliawan, dan staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Dr. A Purnomo, serta Dirjen Bina Bangda Kemendagri Dr. Sofyan Bakar M. Sc. Dengan para undangan peserta seluruh Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi.

Selanjutnya pada acara sesi kedua yaitu



menghadirkan narasumber seluruh Kepala Bappeda Provinsi se-Sulawesi, yang memaparkan tentang Potensi dan Karakteristik Wilayah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan MP3EI Koridor IV wilayah Sulawesi yaitu Sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional.

Adapun yang menjadi Rumusan Hasil kesepakatan Musrenbang Regional se Sulawesi Tahun 2013 di Gorontalo yang dikemas dalam "DEKLARASI HULONDALO" Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Se-Sulawesi Tentang "Program Prioritas Pulau Sulawesi" adalah sebagai berikut:

1. Memfokuskan program yang tertuang dalam Master List MP3EI Koridor Sulawesi dan mempercepat pencapaian sasaran MDGs 2015 dan peningkatan IPM Sulawesi melalui kerjasama regional yang saling menguntungkan serta isu-isu strategis Provinsi se Sulawesi berorientasi lingkungan tahun 2014.
2. Meningkatkan pengembangan infrastruktur transportasi pulau Sulawesi, melalui pemantapan kualitas jalan trans Sulawesi, peningkatan fasilitas bandara, peningkatan fasilitas pelabuhan laut, mempercepat pembangunan jalur kereta api, prasarana irigasi akseibilitas pengolahan hasil dan ketenaga listrikan selambat-lambatnya tahun 2014.
3. Mendorong terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di seluruh Provinsi se Sulawesi paling lambat 2015.
4. Mempercepat pembangunan ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan Sulawesi, pengembangan destinasi pariwisata terintegrasi se Sulawesi, serta pengembangan kawasan industry selambat-lambatnya tahun 2014.
5. Mempercepat terwujudnya kerjasama pengelolaan terpadu dan keberlanjutan Teluk Tomini dan Teluk Bone selambat-lambatnya tahun 2014.



Trofi Anugerah Pangripta Nusantara, yang artinya kurang lebih “Anugerah perencanaan pembangunan nasional” melambangkan semakin mantap dan tegaknya pembangunan di lima wilayah kepulauan Indonesia yang menggambarkan keseluruhan 33 provinsi, yang berbeda-beda namun mewujudkan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Trofi Anugerah Pangripta Nusantara diberikan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan. Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan adalah memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Pada tahun 2013 ini dalam rangka Pemberian Anugerah Perencanaan Pangripta Nusantara kepada Kabupaten/Kota maka pemerintah provinsi Sulawesi Tengah melalui Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah khususnya pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi akan menilai dokumen perencanaan terhadap 11 kabupaten/kota dalam rangka pemberian Anugerah Tersebut. Pemberian Anugerah perencanaan pangripta nusantara tersebut bertujuan untuk mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan; serta sekaligus menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan bermutu.

Penghargaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota terbaik dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:

(1) Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan yang dinilai

Dokumen rencana pembangunan yang dinilai adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota yang berlaku secara sah baik dalam bentuk Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah.

(2) Pemilihan Metode dan Kriteria Penilaian

Metode penilaian dilakukan dengan metode pembobotan dengan menggunakan empat (4) parameter dan lima belas (15) indikator.

(3) Penilaian tahap I

Penilaian tahap I dilaksanakan terhadap dokumen RKPD Kabupaten/Kota di setiap provinsi. Penilaian dilakukan berdasarkan 4 parameter dan 15 indikator yang telah ditetapkan. Proses penilaian tahap I menghasilkan 3 wilayah kabupaten/kota terbaik. Penilaian terhadap dokumen perencanaan pada tahap I ini memiliki bobot nilai 30% dari seluruh penilaian.

(4) Penilaian tahap II

Penilaian tahap II dilaksanakan melalui wawancara terhadap 3 wilayah Kabupaten/Kota terbaik. Penilaian wawancara pada tahap II adalah dengan bobot nilai 40% dari seluruh penilaian. Hasil penilaian tahap II akan menghasilkan 1 Kabupaten/Kota terbaik. Hasil

penilaian tahap II disampaikan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk dilanjutkan penilaiannya dalam skala nasional oleh Tim Penilai Pusat.

(5) Penilaian tahap akhir

Pada penilaian tahap akhir, Tim Penilai Pusat menerima hasil penilaian RKPD Kabupaten/Kota terbaik masing-masing 1 (satu) dari setiap provinsi. Tim Penilai akan melakukan penilaian terhadap 33 RKPD Kabupaten/Kota. Penilaian akan dilakukan dalam bentuk wawancara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan bobot nilai 30%. Penilaian tahap akhir akan menghasilkan 3 Pemenang Kabupaten/Kota terbaik dan 3 Pemenang Harapan Kabupaten/Kota Terbaik.

KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian untuk RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 menggunakan empat (4) parameter sebagai berikut:

(1) Keterkaitan

Penilaian didasarkan pada keterkaitan dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 dengan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota dan RKPD Provinsi Tahun 2013 dengan menggunakan dua indikator, yaitu: (a) tersedianya penjelasan tentang tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan prioritas dalam RKPD Kabupaten/Kota 2013 yang terkait dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan prioritas dalam RPJMD Kabupaten/Kota; (b) tersedianya penjelasan tentang tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan prioritas dalam RKPD Kabupaten/Kota 2013 yang terkait dengan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan prioritas dalam RKPD Provinsi 2013.

(2) Konsistensi

Penilaian didasarkan pada konsistensi dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2013 terutama konsistensi antara hasil evaluasi dengan isu strategis, isu strategis dengan prioritas, dan prioritas dengan penganggaran. Indikator yang digunakan untuk menilai konsistensi RKPD Kabupaten/Kota 2013 adalah: (a) tersedianya penjelasan tentang konsistensi hasil evaluasi



pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota 2012 dengan rumusan isu strategis tahun 2013; (b) tersedianya penjelasan tentang konsistensi isu strategis dengan prioritas RKPD Kabupaten/Kota 2013; dan (c) tersedianya penjelasan tentang konsistensi prioritas dan penganggaran RKPD Kabupaten/Kota 2013.

(3) Kelengkapan dan Kedalaman

Penilaian didasarkan pada kelengkapan dan kedalaman dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2013 dalam menyajikan kerangka ekonomi daerah; kerangka kebijakan keuangan daerah; analisa, arah kebijakan dan prioritas pengembangan wilayah; strategi dan arah kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah (*pro-growth*); strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan (*pro-poor*); strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran (*pro-job*); strategi dan arah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan (*pro-environment*); serta strategi dan arah kebijakan percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDG's). Indikator yang digunakan untuk menilai kelengkapan dan kedalaman dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2013 adalah: (a) tersedianya penjelasan tentang kerangka ekonomi daerah 2013; (b) tersedianya penjelasan tentang kerangka kebijakan keuangan daerah 2013; (c) tersedianya penjelasan tentang analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas wilayah 2013; (d) tersedianya penjelasan tentang strategi, arah kebijakan dan prioritas percepatan pertumbuhan ekonomi (*Pro-Growth*); (e) tersedianya penjelasan strategi, arah kebijakan dan prioritas pengurangan kemiskinan (*Pro-Poor*); (f) tersedianya penjelasan tentang strategi, arah kebijakan dan

prioritas pengurangan pengangguran (*Pro-Job*); (g) tersedianya penjelasan tentang strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan berwawasan lingkungan (*Pro-Environment*); dan (h) tersedianya penjelasan tentang strategi, arah kebijakan dan prioritas percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDG's).

(4) Keterukuran

Penilaian didasarkan pada keterukuran tujuan dan sasaran RKPD 2013 yang dilengkapi dengan indikator kinerja, dan prakiraan maju anggaran tahun berikutnya. Indikator yang digunakan untuk menilai keterukuran dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2013 adalah: (a) tersedianya penjelasan tentang rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program dan kegiatan, dan pagu anggaran SKPD Kabupaten/Kota tahun 2013 yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur; dan (b) tersedianya penjelasan tentang prakiraan maju anggaran tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penilaian dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2013 kemudian dilakukan verifikasi terhadap proses dan prinsip penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2013 dengan menggunakan 4 (empat) kelompok parameter dan 8 (delapan) indikator.

MEKANISME PENERIMAAN PENGHARGAAN

(1) Berdasarkan seluruh hasil penilaian Tim Penilai Teknis, Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen di Provinsi, baik melalui Tahap I dan tahap II, dilaksanakan Penilaian Akhir di Pusat oleh Tim Pelaksana Anugerah Pangripta Nusantara 2013 melalui verifikasi/wawancara langsung terhadap 33 RKPD kabupaten/kota.

(2) Tim Pelaksana melaporkan seluruh hasil penilaian kepada Tim Pengarah.

(3) Tim Pengarah membahas dan menyampaikan hasil penilaian Tim Penilai Independen kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

(4) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menetapkan Pemenang 1,2, dan 3, serta Pemenang Harapan 1,2, dan 3 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokumen terbaik RKPD 2013.

Millennium Development Goals (MDGs)

In September 2000, UN member states have committed to halving global poverty by 2015. The deadline is fast approaching, but global poverty is still a grim reality.



MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG'S) *setelah 2015 lalu apa...???*

Konsultasi Nasional Agenda Pembangunan Pasca 2015 berlangsung selama dua hari pada tanggal 20-21 Februari 2013 di Hotel Le Meridien dengan tema “Merumuskan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca berakhirnya MDG’s 2015 untuk menjawab tantangan Baru Pembangunan Berkelanjutan dan Kemitraan Pada Segala Tingkatan”. Pembukaan dilaksanakan di Istana Negara oleh Presiden RI dan dihadiri oleh 222 peserta dari seluruh Indonesia yang berasal dari institusi pemerintahan (Kementerian, Gubernur, Bupati/Walikota, DPRDPRD), masyarakat sipil, perusahaan, akademisi dan komunitas riset, dan kaum muda.

Forum ini merupakan konsultasi publik tingkat nasional untuk menyongsong pertemuan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka (*High Level Panel of Eminent Persons* atau HLPEP). Dalam HLPEP Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi co-

chairs bersama Ellen Johnson Sirleaf (Presiden Liberia) dan David Cameron (Perdana Menteri Inggris). Anggotanya 27 tokoh dunia, antara lain Horst Kohler (eks Presiden Jerman), Kadir Topbas (Walikota Istanbul), Paul Polman (CEO Unilever), hingga Tawakkol Karman (peraih Nobel Perdamaian). Panel ini diamanahi tugas oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk ikut berperan merumuskan agenda pembangunan setelah MDGs berakhir pada 2015.

Dalam sambutan pembukaannya, Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa MDG’s dinilai cukup berhasil sebagai sebuah mekanisme global melawan kemiskinan selama ini. Namun, MDG’s dirasa belum cukup mampu menjawab akar persoalan pembangunan berkelanjutan dan mengurai penyebab kemiskinan karena MDG’s lebih cenderung memberi penekanan pada pencapaian target ketimbang memberi perhatian pada prosesnya. Dengan demikian

salah satu implikasi utamanya ke depan, harus ada perubahan paradigma dalam memandang kemiskinan yang harus digeser secara mendasar, dari pendekatan “*poverty alleviation*” menuju, atau dilengkapi dengan, “*leaving poverty behind*”. Perubahan paradigma ini pada akhirnya akan mempengaruhi perubahan pendekatan dalam penyusunan kebijakan dan praktik pembangunan. Pembangunan di masa depan harus lebih inklusif dan partisipatif.

Menurut Presiden Yudhoyono, Indonesia masih butuh MDG’s dan dibutuhkan kerangka kerjasama baru setelah MDGs berakhir. Oleh karena itu, setelah tahun 2015, MDGs akan digantikan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan.

Terkait dengan implementasi *Millennium Development Goals* (MDG’s) di Indonesia dan keberlanjutannya Pasca 2015, terdapat beberapa catatan penting serta masukan oleh berbagai pakar, diantaranya :

1. ***Ibu Nila Moeloek (KUKPRI-MDGs)***: menunjukkan bahwa angka merah capaian MDGs di Indonesia terletak pada isu angka kematian ibu, HIV/AIDS dan akses air bersih serta sanitasi. Dalam kaitannya dengan keberlanjutan MDGs pasca 2015, pembangunan manusia adalah modal pokok untuk menentukan ketahanan ekonomi untuk menghasilkan manusia yang berdaya saring bukan hanya secara pikiran namun juga bermoral.
2. ***Bp. Sugeng Bahagijo (INFID)*** menyatakan bahwa MDG’s lebih nampak sebagai *political narrative* ketimbang sebagai kebijakan dan prioritas pembangunan. Tujuan agenda pembangunan pasca 2015, bukan hanya mengenai pencapaian GDP, tetapi juga kualitas warga terkait kesehatan, lingkungan hidup dan *political voice*.
3. ***Bp. Junardy (Indonesia Global Compact Network)***: prioritas yang menjadi *scope* agenda pembangunan pasca-2015 harus spesifik, konkrit dan mampu dicapai dalam sebuah *time frame* 15-20 tahun.
4. ***Bp. Septer Manufundu (Forum LSM Papua)***:

Agenda pasca 2015 yang relevan bagi Papua seyogyanya mencakup penanganan konflik khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi SDM yang sekaligus mendiskreditkan masyarakat di tanahnya.

Selain paparan oleh beberapa narasumber, dilakukan pula diskusi kelompok yang dilakukan secara paralel, melibatkan lima kelompok pemangku kepentingan pembangunan, yakni: masyarakat sipil, sektor publik/pemerintah, sektor swasta, kaum muda, dan akademisi. Topik yang dibahas dalam diskusi kelompok tersebut mencakup beberapa hal, yaitu: (a). isu utama pembangunan Pasca 2015 yang tegas (*bold*), ambisi (*ambitious*) dan relevan (*relevant*); (b) mekanisme kemitraan pasca 2015 di tingkat nasional dan lokal dan (c) sarana pencapaian (sistem finansial, corak kerjasama, sistem tata kelola, dll).



Presiden SBY, didampingi Ketua Komnas APP 2015 Kuntoro Mangkusubroto, membuka Konsultasi Nasional APP 2015 di Istana Negara, Rabu (20/2) pagi. (foto: www.presidentri.go.id)

Dalam diskusi tersebut, peserta diskusi menggarisbawahi bahwa implemmentasi MDG's di Indonesia dipandang lebih berorientasi target ketimbang prosesnya, sehingga aspek kualitatif terabaikan oleh target pencapaian kuantitatif.

Diskusi kelompok tersebut menghasilkan beberapa catatan penting. Selain beberapa isu mendasar seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, **isu utama pembangunan pasca 2015 yang dirumuskan yaitu dibutuhkan penajaman dan pengembangan pada beberapa aspek tertentu meliputi redefinisi kemiskinan, manajemen konflik dan bencana, kedaulatan rakyat dalam hal hak atas identitas dan hak atas tanah, serta perlunya dimasukkan indikator soal kesenjangan/disparitas/ketimpangan pada indikator 1-7. Sementara itu dalam bidang kesehatan perlu dimasukkan penanganan NCD (Non-Communicable Diseases/penyakit tidak menular) seperti stroke, serangan jantung dan diabetes, penanganan narkoba, pengendalian tembakau dan universal health care.**

Terkait dengan **mekanisme kemitraan**, catatan penting yang dapat disimpulkan adalah bahwa dalam kemitraan global pembiayaan untuk pembangunan bantuan dari negara maju seharusnya menerapkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan rakyat dan penghapusan semua persyaratan yang melemahkan kapasitas rakyat, lokal dan negara; pembiayaan pelayanan dasar seperti pangan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dll merupakan tanggung jawab negara dan tidak boleh diprivatisasi. Selain itu perlu peningkatan implementasi *Good Corporate Governance* sebagai kontribusi sektor swasta dalam pencapaian Post-2015 meliputi : *employment/job creation, tax, payment, human capacity development, sosio-economic empowerment, provision of products and services, technological diffusion* dll. Implementasi kemitraan seharusnya tidak sentralistis di kota besar, dan ada *sharing of power and knowledge* dalam konteks lokal, pelibatan anak muda sebagai mitra strategis, bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek. Lebih



Sekretaris Kabinet Dipo Alam
(foto: www.media.hariantabangan.com)

lanjut diperlukan partisipasi aktif dan setara dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan secara bersama-sama oleh pemerintah dan stakeholders lain.

Catatan penting lainnya terkait dengan upaya pencapaian target-target isu pembangunan tersebut, maka **sarana pencapaian yang diperlukan adalah penambahan indikator keberhasilan pembangunan yang bersifat kualitatif; implementasi berupa kebijakan dan strategi yang harus disesuaikan dengan kondisi nasional/lokal; penyelarasan peraturan, komitmen dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; keterbukaan dalam decision making process pada dimensi horizontal sekaligus vertikal serta dalam proses monitoring-evaluation diusulkan untuk menggunakan metode participatory monev (enduser based reporting).**

Hasil-hasil pokok Konsultasi Nasional tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komite Nasional Perumusan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca 2015 (Komnas APP 2015) untuk diteruskan kepada Presiden RI selaku salah satu Ketua Bersama (co-chair) Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka (HLPEP), guna membantu merumuskan agenda pembangunan pasca 2015 yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan HLPEP selanjutnya di Bali, 25-27 Maret 2013 mendatang.

DIMULAI DARI DATA KE TATA LAKSANA PEMERINTAHAN YANG TEPAT SASARAN

Penulis : Sherly Heumasse dan Akram Zakaria



Program Wajib Belajar 9 Tahun yang digulirkan pada tahun 2004 tidak serta merta berhasil mengembalikan anak-anak usia sekolah ke bangku sekolah. Saat akan diterapkan di Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Pendidikan setempat masih belum punya data akurat tentang jumlah anak yang berhenti sekolah, jumlah anak usia sekolah yang belum duduk di bangku sekolah, dan apa penyebab utama mereka berhenti atau belum bersekolah.

“Ada data tapi sumbernya dari sekolah dan tidak valid” ujar Yohanis Piterson, Kepala bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Polman. Pak Piter, Pak Piter, demikian pria asal Maumere ini biasa disapa, telah lebih dari 10 tahun mengabdikan di Dinas Pendidikan dan Olahraga. Melihat fakta ini, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Dinas Pendidikan kemudian menginisiasi untuk membuat suatu sistem informasi pendataan yang datanya bersumber langsung dari masyarakat.

Agar dapat melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bersehati untuk membenahi data terkait bidang pendidikan di daerah tersebut, dengan menggelar program pendataan bertajuk Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di tahun 2004.

Berbenah data menata rencana

Program SIPBM dimulai dengan pendataan di enam desa di Kecamatan Tinambung dan lima desa di Kecamatan Tapango. Pendataan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan anak usia 0 sampai 18 tahun dan hasil pendataannya menjadi bahan dasar perencanaan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun.

Sebuah tim kemudian dibentuk terdiri dari di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Tim

tersebut terdiri dari elemen Dinas Pendidikan, LSM, dan pers yang punya perhatian besar bagi dunia pendidikan. “Ketiga unsur ini berkolaborasi menjadi sebuah kekuatan besar untuk mengawal program SIPBM. Semua bersinergi karena kekuatan ini penting. Itu modal dan landasan kami,” jelas Nehru Sagena, Fasilitator SIPBM.

Di tahun 2005, pendataan tuntas dilaksanakan pada 7 desa di kecamatan Tinambung dan Tapango. Dari temuan data SIPBM ini teridentifikasi anak-anak usia Sekolah Dasar yang putus sekolah dilengkapi dengan penyebabnya, dan kondisi ekonomi orang tua. Kegiatan pendataan juga mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi memberikan dukungan agar anak-anak tersebut dapat kembali ke sekolah.

Serangkaian pembahasan untuk menentukan rencana aksi berdasarkan temuan dari kegiatan pendataan pun dilakukan. Pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan pun kemudian diajak serta untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah. Sebanyak 11 anak putus sekolah yang teridentifikasi di Desa Tapango akhirnya kembali bersekolah berkat dukungan Komite Sekolah. “Saya sangat gembira karena bisa sekolah lagi”, ungkap Hendra

Sebuah rencana aksi desa dibuat untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke sekolah dengan melibatkan komite sekolah. 11 anak putus sekolah ini kemudian diserahkan oleh pihak Komite Sekolah kepada pihak Sekolah dalam sebuah seremoni pada 28 Desember 2004. “Saya prihatin, banyak anak di desa kami yang tidak sekolah. Saya dekati orang tuanya dan bicara dari hati ke hati. Soal seragam, buku, alat tulis jangan dipikirkan, kami akan usahakan. Akhirnya orang tua setuju anaknya kembali ke sekolah. Senang sekali rasanya”, ungkap Muhdar, seorang anggota Komite sekolah di SDN 030 Tapango.

Rasa haru dan gembira terutama dialami oleh

*“Kami berpikir,
bagaimana kita
bisa membangun
suatu daerah
kalau tidak ada
data akurat” -
Bupati Polewali
Mandar, Ali
Baal.*

Hendra, satu dari sebelas anak itu yang kini telah duduk di kelas 2 SMA. “Kalau saya tidak kembali bersekolah saat itu, mungkin sampai sekarang saya masih tidak bersekolah”, tutur Hendra. Abdul Salam, Kepala Desa Tapango, tak kalah bersyukur. “Tanpa data SIPBM, kami tak tahu persis berapa anak putus sekolah yang ada di desa kami”, ungkapnya penuh rasa haru.

Kisah yang sama dialami M.Ali, anak putus sekolah dari Desa Bussu. Karena orangtuanya tidak punya biaya, terpaksa Ali harus putus sekolah. Adalah Basir Amin, Ketua Badan Amil Zakat Desa Bussu sekaligus fasilitator SIPBM. Karena prihatin dengan anak putus sekolah di desanya, muncul ide untuk memberi beasiswa melalui lembaga amil zakat. “Saya mengajak orang tua santri khususnya petani coklat untuk mengeluarkan zakat 2.5% dari 1 juta rupiah. Uang sebesar 25 ribu rupiah ini lalu dikumpulkan dan setiap Jumat saldonya diumumkan di mesjid,” kisah Pak Basir yang juga guru mengaji di desa Bussu. “Syukur alhamdulillah, berkat beasiswa dari lembaga amil zakat, beberapa anak saat ini sudah bisa bersekolah mulai dari pesantren, Madrasah Aliyah Negeri sampai kuliah,” imbuhnya bangga. “Saya

bertekad akan membalas kebaikan masyarakat desa Bussu dengan cara belajar keras agar bisa sukses dan kembali untuk membangun desa ini” kata Ali yang saat ini kuliah di Universitas Negeri Makassar.

Memutakhirkan data untuk perluasan manfaat

Setelah setahun melaksanakan berbagai aksi menindaklanjuti hasil pendataan SIPBM, di tahun 2006 Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar menyempurnakan instrumen pendataan ini. Karena telah berkomitmen untuk melakukan pendataan setiap tahun, di tahun 2007, proses pendataan kembali dilaksanakan pada 15 Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar dengan meliputi 132 Desa/ Kelurahan.

Melihat program SIPBM membawa hasil dan dampak nyata, data SIPBM kemudian dijadikan data dasar untuk Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Polewali Mandar untuk tahun 2008 hingga 2013. Namun tak hanya berhenti sampai disitu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi persoalan pendidikan dasar di Kabupaten Polewali Mandar. Setelah pendataan SIPBM periode 2004-2007, ternyata masih tinggi angka putus sekolah,





mencapai 80 persen. Oleh karena itu, Pemkab Polman merancang lanjutan program SIPBM yang disebut Program Study Anak Diluar Sekolah Fokus Transisi (*Lulus SD/Mi sederajat Tetapi Tidak Lanjut Ke SMP/MTs sederajat*) atau dikenal dengan nama **Program Transisi** pada tahun 2011 dengan Pilot Project pada 10 Desa di Kecamatan Binuang dan 12 Desa di Kecamatan Mapilli.

Program Transisi diawali dengan pemutakhiran data SIPBM 2007. Setiap desa melakukan kegiatan Diskusi Kelompok Terbatas, tujuannya bukan hanya mendata ulang tapi juga melakukan konsultasi dan advokasi agar anak putus sekolah bisa dikembalikan. Tim pendata turun langsung ke rumah-rumah untuk melakukan advokasi. Posko pengaduan anak putus sekolah dibentuk hingga tingkat dusun.

Hasilnya, ditemukan 438 anak yang tidak bersekolah di Kecamatan Tinambung karena tidak adanya sarana pendidikan bagi anak usia dini (PAUD) selain karena masalah biaya. Temuan ini menyadarkan masyarakat yang dalam Rencana Aksi Desa mengusulkan pembangunan fasilitas PAUD/TK dan program beasiswa.

Beruntung, kecamatan ini termasuk dalam lokasi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (sebelumnya dikenal dengan Program Pengembangan Kecamatan - PPK). "Saya bersyukur, ada SIPBM dan PNPM yang menindaklanjuti hasil pendataan dengan membangun sarana sekolah dan pemberian beasiswa," ujar Ramli, Fasilitator PNPM

kecamatan Tinambung.

"Dulu kami belajar di bawah kolong rumah. Untung ada PPK yang mau membiayai pembangunan sekolah. Sekarang saya sangat bahagia dan perasaan plong," kenang Ibu Masni, pengelola Kelompok Bermain Melati Aisyiah di Desa Batulaya. "Sekarang, 7 Desa dan 1 Kelurahan di kecamatan Tinambung, telah memiliki sarana Taman Kanak-Kanak, PAUD, Posyandu dan Poliklinik berkat data SIPBM," ungkap Haidir, Lurah Tinambung. Ia pun berharap pemutakhiran data SIPBM dapat terus dilakukan minimal sekali dalam lima tahun agar data tetap valid.

Berkat dukungan dana APBD dan bantuan UNICEF, pemutakhiran data SIPBM anak putus sekolah dapat dilaksanakan. Hasilnya di Kecamatan Binuang, 271 anak dari keluarga miskin dari 530 teridentifikasi, dapat dikembalikan ke sekolah. Ernia adalah salah satu dari 271 anak penerima beasiswa.

Ernia adalah seorang anak berusia 13 tahun di Batetangnga yang putus sekolah demi mengurus empat orang adiknya seorang diri. Ayahnya meninggal ketika Ia berumur 10 tahun dan ibunya pergi meninggalkan mereka begitu saja. Keberadaan Ernia dan saudara-saudaranya diketahui karena ada laporan tetangganya yang juga selama ini membantu hidup sehari-hari mereka.

Setelah berkoordinasi dengan kepala dusun dan Kepala Sekolah MTs DDI Kanang, tim program transisi mencari jalan untuk mengembalikan Ernia dan adik-adiknya ke bangku sekolah. "Tahun ajaran

2010/2011, sekolah kami menerima hasil pendataan SIPBM. Ada 26 anak di desa Batetangnga yang putus sekolah di kelas 7 dan kelas 8. Salah satunya Ernia, di kelas 7,” ungkap M.Saleh, Kepsek Madrasah Tsanawiyah DDI Kanang.

Menurut Pak Piter, intervensi Pemkab Polewali Mandar dengan dukungan UNICEF melalui program Transisi hingga April 2012 membuat tak kurang dari enam ribu anak di kabupaten ini bisa kembali bersekolah hingga ke jenjang SMP.

Kunci sukses

Keberhasilan Kabupaten Polewali Mandar membangun sistem informasi berbasis masyarakat tak lepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten yang mengalokasikan anggaran khusus untuk membenahi data dan kegiatan tindak lanjutnya. Dukungan pun datang dari berbagai pihak seperti UNICEF dan PNPM, baik dalam hal teknis maupun kucuran dana.

Ini bisa dilihat dari tahun 2004 sampai 2007, dana alokasi APBD Polman sebesar Rp.404 juta dan alokasi dana UNICEF sebesar Rp.750 juta. Sementara untuk menindaklanjuti hasil SIPBM, pemerintah daerah lewat alokasi APBD memberikan dukungan beasiswa bagi anak putus sekolah dan tamat tidak lanjut pada tahun 2007 sebesar Rp.250.000/anak/tahun kepada 438 siswa. Tahun 2008, beasiswa anak putus sekolah sebesar Rp.360.000/siswa untuk 850 siswa dan beasiswa Miskin Berprestasi sebanyak Rp.360.000/tahun untuk 250 Siswa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga bekerjasama dengan UNICEF dan PNPM Generasi Sehat Cerdas yang berfokus pada penuntasan wajib belajar. Untuk tuntas belajar di pendidikan dasar bagi sekitar enam ribu anak ini, biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp.1 miliar. “Tidak ada alasan apapun yang bisa membuat anak putus sekolah, semua anak di Polman harus bersekolah,” tegas Ali Baal.

Keinginan ini diwujudkan dalam Peraturan Bupati Polman No.14 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar 12 tahun dan Instruksi Bupati Nomor.421/5183/DISDIKPORA tentang Pemutakhiran data SIPBM. Kedua aturan ini mewajib setiap desa membiayai minimal 2 anak putus sekolah, membuka posko pengaduan putus sekolah, memutakhirkan data SIPBM setiap tahunnya dan melakukan pendataan ulang setiap 5 tahun untuk memastikan tidak ada lagi anak SD yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP. Peraturan ini juga tidak mensyaratkan siswa untuk memakai seragam sekolah. “Tidak punya seragam tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bersekolah,” imbuh Ali Baal.

SIPBM bukan semata-mata bagaimana menghasilkan dan memanfaatkan data. Namun lebih penting adalah pendataan berbasis aksi. Pendataan yang dikemas dalam bingkai advokasi, bagaimana membangun kesadaran bersama bahwa masalah pendidikan, masalah putus sekolah, masalah buta huruf bukan semata tanggung jawab pemerintah, namun semua elemen masyarakat karena pendidikan dasar adalah hak asasi bagi generasi muda dan investasi bangsa untuk mencapai tujuannya.

Tulisan ini merupakan dokumentasi Praktik Cerdas bidang Tata Pemerintahan yang diangkat BaKTI dalam Festival Forum Kawasan Timur Indonesia 2012 di Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Praktik Cerdas ini, Anda dapat menghubungi info@bakti.org atau telepon ke 0411 833383





Sail Menuju Tomini 2014



Yacht Rally



Fleet Review



Tomini 2014 Diving Festival



Festival Budaya



Tomini 2014
Bisnis Forum and Exhibition



Bazaar



Festival music tradisional



Olahraga Bahari



Panggung Hiburan





Saliman Simanjuntak : “Kelola Air Dengan Benar, Masyarakat Kan Sejahtera”

Dalam rangka tercapainya visi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan serangkaian misi, yang salah satu misinya yaitu percepatan reformasi birokrasi, penegakan suprenasi hukum dan HAM dan pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, pada awal tahun 2013 Pemerintah Provinsi melakukan pembenahan dalam perubahan struktur organisasi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, Hal ini dilakukan agar pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Struktur organisasi yang mengalami perubahan salah satunya adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah melalui

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No.09 tahun 2012 berubah menjadi 3 SKPD yaitu Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Bina Marga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Sumberdaya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah . Untuk melihat sejauh mana kebijakan dan strategi kedepan dalam pelaksanaan SKPD baru tersebut maka tim redaksi melakukan wawancara dengan salah satu SKPD baru tersebut yaitu Bapak Saliman Simanjuntak Kepala Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian cuplikan wawancaranya

Sebagai nahkoda pada SKPD yang baru dimekarkan, apa yang bapak lakukan dalam

menjalankan tupoksi Bapak .

Sesuai tupoksi saya sebenarnya sudah sangat jelas bahwa saya akan membantu Bapak Gubernur berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Air . Dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan berkaitan dengan sumberdaya air.

Di dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan sumber daya air saat ini saya sangat konsen dengan pencapaian indikator outcomenya yaitu dengan cara bagaimana merencanakan dan melaksanakan suatu program dan kegiatan pengelolaan sumberdaya air, yang memang benar-benar ditujukan untuk pelayanan masyarakat yang hasil akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi tengah melalui pengelolaan sumberdaya air yang tepat sasaran dan tepat guna, efektif dan efisien. “Kelola air dengan benar, masyarakat kan sejahtera” Lebih lanjut kata Saliman kedepan saya ingin sekali semua stakeholder mempunyai pemahaman yang sama mengenai hal-hal yang saya sampaikan tadi sehingga kedepan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang hanya dibangun untuk penanggulangan secara non permanen tetapi bagaimana investasi yang tepat guna dan tepat sasaran yang kita keluarkan memang benar-benar investasi yang bisa dinikmati masyarakat dalam jangka waktu yang panjang sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perlu saya sampaikan juga bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara pemerintah dalam hal ini kementerian PU dan dan pemerintah daerah dalam hal ini dinas Sumberdaya Air bahwa dalam pengelolaan Sumber Daya Air, tidak ada lagi dikotomi antara kewenangan pusat dan daerah. Karena pemerintah akan tetap membantu melalui dana APBN daik dekonsentrasi maupun tugas pembantuan bagi daerah-daerah yang mempunyai pendanaan terbatas dan pemerintah daerah hanya menyiapkan proposal dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Selaku SKPD yang baru, sasaran-sasaran yang bapak sampaikan tadi. apakah sudah dimasukkan dalam dokumen perencanaan SKPD Bapak sehingga mempermudah didalam pengukuran kinerja SKPD yang Bapak pimpin ?

Saat ini kami sedang melakukan penyusunan dokumen perencanaan yaitu Renstra yang merupakan rencana strategis yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan dan renstra tersebut nantinya akan difasilitasi oleh Bappeda dalam penyusunannya karena renstra tersebut disusun harus mengacu pada RPJMD provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016. Dan sasaran pokok setiap program yang akan kami laksanakan akan bermuara pada tercapainya indikator tersebut.

Apa harapan-harapan bapak ke depan dalam pelaksanaan tugas-tugas di SKPD yang baru yang Bapak Pimpin ini ?

Harapan saya agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar selalu dilakukan secara terpadu dan tetap tetap selalu bersama-sama dengan Bappeda dan SKPD teknis lainnya saling berkoordinasi agar perencanaan dapat dilakukan secara terpadu antar lintas SKPD sehingga kedepan tidak terjadi seperti di daerah lainnya misalnya pembangunan irigasi yang diberikan investasi pemerintah sangat besar tetapi tidak didukung oleh SKPD lainnya misalnya pencetakan sawah baru dan sebagainya . dan harapan saya yang terakhir adalah kiranya semua stakeholder mempunyai pemahaman yang sama dalam pengelolaan Sumber Daya Air yang benar-benar memperhatikan outcomenya bukan hanya output saja.

BIODATA :

- I. Data Pribadi
 1. Ir. Saliman Simanjuntak, Dipl.HE
 2. Pematang Siantar, 25 Desember 1958
- II. Pendidikan Umum :
 1. SDN Sumut Tahun 1970
 2. SPMN P. Tongah Sumut Tahun 1973
 3. SMAN VI Bandung Tahun 1976
 4. ITB Bandung Tahun 1983
 5. IHE Nederland Tahun 1991
- III. Riwayat Jabatan/Pekerjaan
 1. Kepala Dinas Praswil Kab. Donggala Tahun 2005
 2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Donggala Tahun 2008
 3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Tengah tahun 2012
 4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2013

Eksotis Nan Indah

Pantai Siuri, Air Terjun Saluopa
Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah



Kabupaten Poso adalah satu dari kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki banyak potensi pariwisata. Danau Poso!! Salah satu daya tarik pariwisata di kabupaten Poso yang keindahannya tak perlu diragukan dan telah banyak dikenal oleh para pencinta keindahan alam lokal maupun mancanegara. Danau ini mempunyai panjang kurang lebih 32 km dengan lebar kurang lebih 16 km dan mempunyai kedalaman danau mencapai 510 meter. Saking luasnya, keindahan Danau Poso dapat dilihat dari berbagai macam “sudut”, dan salah satu sudut terbaiknya adalah **Pantai Siuri**. Tempat wisata ini terletak di Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat. Dari “sudut” ini Danau Poso akan

terlihat seperti lautan lepas, namun anda akan percaya bahwa itu benar-benar sebuah danau apabila anda merasakan airnya yang tawar secara langsung. Pantai Siuri memiliki pasir berwarna kuning yang mempesona, sehingga tak heran para wisatawan mancanegara maupun lokal menjadikan tempat ini sebagai tujuan wisata favorit. Tempat wisata ini juga di dukung dengan adanya Cottage-cottage yang di bangun, yang dapat dijadikan sebagai tempat menginap

para wisatawan. Cottage ini disewakan dengan harga yang bervariasi, yaitu sekitar Rp. 200.000 – Rp. 250.000/malam, dengan harga yang cukup terjangkau tersebut para wisatawan dapat menikmati keindahan Pantai Siuri yang menawan. Suasana tenang, pasir kuning yang mempesona, serta tempat menginap yang nyaman, **EKSOTIS NAN INDAH !**

Selain Pantai Siuri, masih ada “mutiara” lainnya di kabupaten Poso yang keunikan dan keindahannya belum banyak terpublikasi, yaitu **Saluopa Waterfall**. Yah benar!! Saluopa Waterfall atau yang oleh masyarakat sekitar disebut **Air Luncur Saluopa** terletak disekitar 12 km sebelah barat, atau

tepatnya berada di Desa Tonusu, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso. Wisatawan dapat menempuh lokasi wisata ini dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua.

Sesampainya dilokasi, perjalanan akan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 500 m menuju ke air terjun. Namun tidak perlu khawatir akan merasa lelah, karena perjalanan anda menuju ke air terjun akan ditemani oleh kicauan burung-burung dan pemandangan alam yang indah sehingga jarak 500 m tidak akan terasa bagi kaki anda. Begitu tiba, “lukisan” air terjun 12 tingkatan akan langsung menyambut.



Air yang meluncur begitu jernih sehingga kita dapat dengan jelas melihat batu-batuan yang ada di dalamnya. Unikny, batu-batuan tersebut memiliki permukaan yang bergerigi sehingga pengunjung tidak perlu khawatir terpeleset apabila ingin berjalan di atasnya. Tidak hanya sampai disitu, air terjun Saluopa dikelilingi oleh hutan tropis yang masih terjaga keasriannya, sehingga makin memperkuat kesan *Natural* yang bisa menjadi *Therapy* bagi pengunjung yang menginginkan

suasana tenang dan damai. Sesekali diantara percikan air terjun muncul warna pelangi yang sangat indah dan mempesona. Tiket masuk pada kawasan wisata Saluopa Waterfall ini dibeli dengan harga Rp.2.000/org. Namun untuk fasilitas penginapan di kawasan wisata Saluopa Waterfall sampai saat ini masih dalam proses pembangunan.

Melihat keadaan dan suasana yang disajikan oleh Air Terjun Saluopa yang begitu Asri, Unik, dan Indah, tak berlebihan jika kita kembali menggunakan kalimat, **“EKSOTIS NAN INDAH”**.



st 2013
SENSUS PERTANIAN



APEL SIAGA SENSUS PERTANIAN 2013
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH



Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar apel siaga sensus pertanian 2013, hari Jumat tanggal 8 Maret 2013. Pelaksanaan apel siaga dipusatkan di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan dihadiri oleh unsur forum koordinasi pimpinan daerah, kepala SKPD, jajaran staf di lingkup provinsi dan staf di jajaran BPS.

Gubernur Sulawesi Tengah dalam sambutannya mengatakan bahwa Apel Siaga ST2013 ini merupakan kegiatan yang kita selenggarakan sebagai gerakan moral untuk memotivasi semangat, menyatukan langkah dan membulatkan tekad kita semua dalam mensukseskan ST2013.

Tema Sensus Pertanian 2013 adalah menyediakan informasi untuk masa depan petani yang lebih baik.

Cakupan data yang dicover dalam pelaksanaan ST2013 meliputi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan-Kelautan.

Dengan tersedianya data pertanian yang lengkap dan akurat hasil ST2013 tersebut, diharapkan pembangunan pertanian menjadilebih terarah dan tepat sasaran. Hal ini tentu sangat penting, apalagi bila kita kaitkan dengan Visi Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu “Sulawesi Tengah sejajar dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia, dalam pengembangan agribisnis dan kelautan melalui peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing pada tahun 2020.

SOSIALISASI RPJMD DI KABUPATEN/KOTA

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setelah Gubernur dan Wakil Gubernur di lantik dan harus di tetapkan berupa peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih di lantik dan pada saat ini RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016. RPJMD tersebut telah ditetapkan melalui Perda No. 4 Tahun 2011.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan manajerial

komprehensif sekaligus sebagai perencanaan taktis strategis daerah, yang mana penyusunannya merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, saat ini RPJMD tersebut telah ditetapkan dengan Perda No. 4 Tahun 2011

Pada tahun 2012 dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah telah di sosialisasikan di tingkat Provinsi dan Tahun 2013 ini telah di agendakan oleh Bappeda Provinsi untuk melaksanakan sosialisasi dokumen RPJMD di Kabupaten. Pada saat sosialisasi tersebut juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Password Data Masyarakat Miskin By Name By Address dari TNP2K dan penyerahan Dokumen Perencanaan yang dihasilkan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012



Kabupaten Tolitoli



Kabupaten Buol





Kabupaten Poso



Kabupaten Tojo Unauna



Kabupaten Morowali



Kabupaten Sigi



MUSRENBANG KABUPATEN

MUSRENBANG KABUPATEN POSO



Forum SKPD dan Musrenbang RKPDP Kabupaten Poso Tahun 2013 dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan dan antar susunan pemerintahan.

Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPDP Kabupaten Poso Tahun 2014, diselenggarakan selama 2 (dua) hari tanggal 20 s.d 21 Maret 2013, dengan

maksud pelaksanaan Musrenbang RKPDP adalah sebagai forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Poso Tahun 2013. Dengan tujuan :

1. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
2. mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten pada musrenbang kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPDP kabupaten dilaksanakan.
3. mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten; dan
4. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.

MUSRENBANG KABUPATEN DONGGALA

“ Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2013, Kita Mantapkan Perekonomian Daerah Kabupaten Donggala Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan ”

Musrenbang RKPD kabupaten merupakan wahana antar piha-pihak langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang Kabupaten Donggala dilaksanakan pada 13-14 Maret 2013 dan dibuka secara resmi oleh Bupati Donggala Drs. H. Habir Ponulele, M.Si di Ruang Rapat Kasiromu Kantor Bupati Kabupaten Donggala. Turut hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Kabupaten Donggala Aly Lasamaulu, SE, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Donggala Ahmad Marjanu, Sekkab Donggala Drs. H Syafruddin H Muda, M.Si, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Prof.Dr.rer.pol Patta Tope, SE dan Plt. Sekretaris Kabupaten Donggala.



MUSRENBANG KABUPATEN SIGI

“ Melalui Musrenbang RKPP Kabupaten Sigi 2013, Kita wujudkan Sinegritas dan Integritas Perencanaan Pembangunan Berbasis Aspirasi Masyarakat ”

Musrenbang RKPD kabupaten merupakan wahana antar piha-pihak langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang Kabupaten Sigi dilaksanakan pada 13-14 Maret 2013 dan dibuka secara resmi oleh Bupati Sigi Drs. Aswadi Randa Lemba, M.Si di Ruang Rapat Kasiromu Kantor Bupati Kabupaten Sigi. Turut hadir pada acara tersebut , Turut hadir pada acara tersebut , Wakil Bupati Kabupaten Sigi Drs. Living Stone Sango, Ketua DPRD Kabupaten Drs. Budi Luhur, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Prof. DR. Rer.pol Patta Tope, SE.





Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh :

Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah





SULAWESI TENGAH DALAM ANGKA

Meningkatnya usaha-usaha pembangunan dalam segala bidang menuntut tersedianya data statistic yang lengkap, akurat dan mutakhir dan berkesinambungan terutama guna menunjang terwujudnya perencanaan yang tepat, pengawasan yang baik, serta evaluasi kritis terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah di capai.

Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan BPS Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyusun Buku Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan PDRB Tahun 2012



ANALISIS INDIKATOR SOSIAL BUDAYA SULAWESI TENGAH

Indikator Sosial Budaya memegang peranan penting, terutama sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi program pembangunan yang telah di capai, terutama di bidang sosial budaya. Analisis Indikator Sosial Budaya Sulawesi Tengah Tahun 2012 menyajikan data tahun 2007 - 2011.

Dari data Indikator Sosial Budaya ini dapat diciptakan beberapa indikator sosial budaya maupun budaya lain itu dapat pula di peroleh gambaran perkembangan sosial budaya dari tahun ke tahun selama priode 2007 – 2011, dalam upaya mewujudkan Sulawesi Tengah sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia.



ANALISIS INDIKATOR EKONOMI SULAWESI TENGAH

Indikator Ekonomi memegang peran penting, terutama sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi program pembangunan yang telah di capai, terutama di bidang ekonomi. Analisis Indikator Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2012 menyajikan data tahun 2007 – 2011, yaitu menggambarkan perkembangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun selama priode 2007 – 2011



KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA ALAM KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pokok-pokok kegiatan ini adalah penyusunan data spasial potensi sumber daya lahan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk menyediakan data/informasi spasial sebagai instrument dalam penyusunan dokumen perencanaan di daerah agar pembangunan lebih terarah dan sumberdaya meliputi sumber daya lahan berupa jenis tanah dan kualitas lahan wilayah, sumberdaya air, sumberdaya hutan, perkebunan dan pertanian.



KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA ALAM KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pokok-pokok kegiatan ini adalah penyusunan data spasial potensi sumber daya lahan Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk menyediakan data/informasi spasial sebagai instrument dalam penyusunan dokumen perencanaan di daerah agar pembangunan lebih terarah dan sumberdaya meliputi : sumber daya lahan berupa jenis tanah dan kualitas lahan wilayah, sumberdaya air, sumberdaya hutan, perkebunan dan pertanian.



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA PROVINSI SULAWESI TENGAH 2012

Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan BPS menerbitkan Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Tengah yang menyajikan data tahun 2007-2011. Data Produk Domestik Regional Bruto ini dapat diciptakan beberapa indikator ekonomi yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan ekonomi dan struktur wilayah. Dan dapat pula di peroleh angka pendapatan perkapita wilayah yang mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data Produk Domestik Regional Bruto sangat bermanfaat untuk mengevaluasi program pembangunan yang lalu serta merencanakan program pembangunan yang akan datang.



RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN TARGET MDGS PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dokumen RAD MDGs Provinsi Sulawesi Tengah ini memuat data dan informasi tentang pencapaian tujuan pembangunan millennium di Provinsi Sulawesi Tengah termasuk permasalahan dan tantangan yang di hadapi. Berdasarkan analisis data dan informasi ini, kemudian di susun arah kebijakan serta target kinerja pencapaian tujuan pembangunan millennium 2011-2015. Dokumen RAD MDGs Provinsi Sulawesi Tengah ini di susun untuk di jadikan pedoman dan rujukan pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pembangunan di Sulawesi Tengah. Secara lebih spesifik , dokumen Rencana Aksi Daerah, swasta dan masyarakat dalam upaya menetapkan skala prioritas program pembangunan.



RENCANA INDUK (MASTERPLAN) PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pembangunan Pendidikan di Sulawesi Tengah di laksanakan dengan mengacu pada Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 yang di tujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Agar peningkatan pembangunan di bidang pendidikan dapat di lakukan secara berkesinambungan dan terkoordinasi maka Dokumen Rencana induk (masterplan) Pendidikan di Sulawesi Tengah dapat di jadikan sebagai panduan untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan pendidikan secara lebih cepat dan tepat serta dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik kepada para pelaku pembangunan pendidikan, baik pemerintah daerah, swasta komunitas maupun masyarakat secara keseluruhan sehingga terwujud proses pembangunan pendidikan yang terpadu, bersinergi dan saling menunjang satu sama lainnya.

TIM REDAKSI



Dirgahayu

PROVINSI SULAWESI TENGAH KE

13 April 2013

49

